

**OPTIMALISASI STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN  
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) MASYARAKAT  
PESAWARAN**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**NADIA EVA PRASANTI  
NPM. 2216041130**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**OPTIMALISASI STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN  
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) MASYARAKAT  
PESAWARAN**

**Oleh:**

**NADIA EVA PRASANTI  
NPM. 2216041130**

**Skripsi**

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **OPTIMALISASI STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) MASYARAKAT PESAWARAN**

**Oleh**

**NADIA EVA PRASANTI**

Penelitian ini mengkaji strategi peningkatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesawaran. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepemilikan IKD yang baru mencapai 12% dari target nasional sebesar 30% serta adanya perlambatan pertumbuhan aktivasi, yang menunjukkan belum optimalnya strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang telah dilakukan serta memberikan alternatif optimalisasi strategi dengan menggunakan teori manajemen strategis David (2006) melalui analisis IFAS, EFAS, dan SWOT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi integrasi layanan dan program jemput bola telah meningkatkan kepemilikan IKD, namun belum signifikan akibat keterbatasan dalam perencanaan, integrasi layanan, dan sosialisasi. Berdasarkan analisis SWOT, posisi organisasi berada pada Kuadran III (W-O), sehingga strategi yang direkomendasikan berfokus pada pemanfaatan peluang dengan meminimalkan kelemahan melalui integrasi aktivasi IKD dalam layanan rutin, pemanfaatan literasi digital masyarakat, optimalisasi waktu pelayanan, penggunaan data SIAK, penguatan infrastruktur TIK, serta sosialisasi berbasis media digital.

**Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital, strategi, pelayanan publik**

## **ABSTRACT**

### **OPTIMIZATION OF STRATEGIES TO INCREASE DIGITAL IDENTITY OWNERSHIP (IKD) AMONG THE PEASAWARAN COMMUNITY**

**By**

**NADIA EVA PRASANTI**

*This study examines strategies to increase the adoption of the Digital Identity Card (IKD) as part of the digital transformation of civil registration services in Pesawaran Regency. The focus of this study is the low rate of DID ownership, which has only reached 12% of the national target of 30%, as well as a slowdown in activation growth, indicating that the strategies of the Population and Civil Registration Office are not yet optimal. This study aims to analyze the strategies that have been implemented and to provide alternatives for strategy optimization using David's strategic management theory (2006) through IFAS, EFAS, and SWOT analyses. This study employs a qualitative approach using descriptive methods, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation, which were then analyzed using the Miles and Huberman interactive model and validated through source triangulation and methodological triangulation. The results indicate that the strategy of integrating services and outreach programs has increased IKD ownership, though not yet significantly due to limitations in planning, service integration, and outreach. Based on the SWOT analysis, the organization is positioned in Quadrant III (W-O), therefore, the recommended strategy focuses on capitalizing on opportunities while minimizing weaknesses through the integration of IKD activation into routine services, leveraging the public's digital literacy, optimizing service times, utilizing SLAK data, strengthening ICT infrastructure, and conducting digital media-based public awareness campaigns.*

**Keywords: Digital Identity, strategy, public services**

Judul Skripsi : **OPTIMALISASI STRATEGI PENINGKATAN  
KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN  
DIGITAL (IKD) MASYARAKAT PESAWARAN**


Nama Mahasiswa : **Nadia Eva Prasanti**

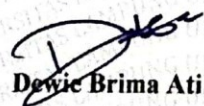
NPM : **2216041130**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

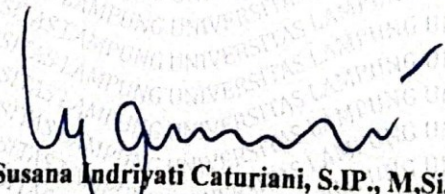
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Meiliana, S.IP., M.A.**  
NIP. 19740520 200112 2 002

  
**Dewic Brima Atika, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19821212 200801 2017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

  
**Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19760914 2000604 2 001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

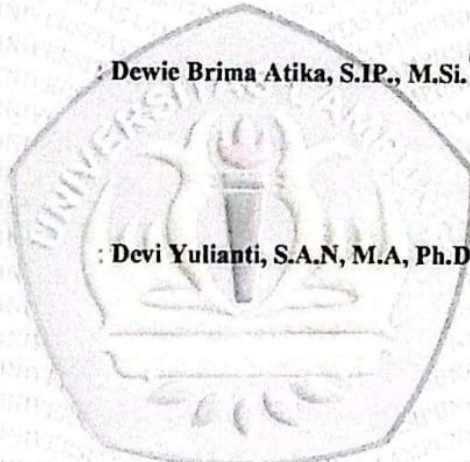
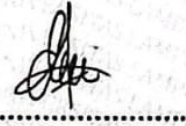
**Ketua : Meiliyana, S.IP., M.A.**



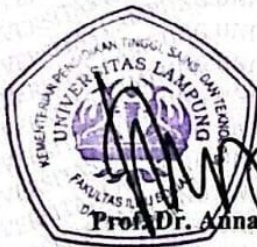
**Sekretaris : Dewic Brima Atika, S.IP., M.Si.**



**Penguji : Devi Yulianti, S.A.N, M.A, Ph.D.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Custina Zainal, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 19760821 200003 2001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 April 2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 27 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Nadia Eva Prasanti

NPM. 2216041130

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nadia Eva Prasanti. Penulis lahir di desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran tepat pada tanggal 15 Juli 2004. Penulis merupakan anak pertama dari empat (4) bersaudara.

Jenjang pendidikan formal penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Harapan Kita (2010), Sekolah Dasar di SDN 2 Pesawaran (2016), Sekolah Menengah Pertama di SMPN 24 Pesawaran (2019), Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kedondong (2022). Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, di antaranya sebagai anggota Gugus Fakultas FISIP bidang Kemitraan dan Bisnis Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Lampung serta anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara (HIMAGARA) bidang Data dan Informasi (DAIN) pada tahun 2023. Pada tahun 2024, penulis aktif sebagai anggota Departemen Hubungan Luar dan Pengabdian Masyarakat (HLPM) UKM Penelitian, anggota Divisi Pengembangan Pelatihan Minat dan Bakat (PPMB) Forkom Bidikmisi KIP-K, serta anggota Hubungan Luar (Hublu) HIMAGARA. Selanjutnya, pada tahun 2025 penulis menjabat sebagai Sekretaris Divisi Dana dan Usaha (Danus) Forkom Bidikmisi KIP-K Universitas Lampung. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I pada Januari–Februari 2025 di Desa Gunung Kramat, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara.

## MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah: 5-6)

*People Can Be Different If They Want To Be*

(Unknown)

“Berdoalah, lalu mewujudkannya”

(So dal mi, Start up)

"...dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah  
diusahakannya."

(QS. An-Najm: 39)

“Ketika Tuhan telah menuntun langkahmu sejauh ini, maka percayalah, Dia tidak  
akan meninggalkanmu di tengah jalan. Setiap proses adalah bagian dari rencana-

Nya yang sempurna.”

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

### ***Bismillahirrohmanirrohim***

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mengucapkan Alhamdulillah atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang tiada henti mengalir dalam setiap langkah kehidupan. Berkat izin-Nya, penulis diberikan kemudahan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalani proses menuntut ilmu sebagai bagian dari ibadah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik dalam menjalani kehidupan.*

*Karya ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada Ibunda terhebat, Susi Dewana Rianti. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, pengorbanan tanpa pamrih, serta doa-doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Dukungan, kesabaran, dan kekuatan yang diberikan menjadi sumber semangat untuk terus melangkah dan berdiri tegak. Tiada kata yang mampu membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Bagi penulis, engkau adalah tempat pulang yang sesungguhnya, bukan sekadar ruang, melainkan kehangatan yang selalu dirindukan.*

*serta*

*Almamaterku tercinta, Universitas Lampung*

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Optimalisasi Strategi Peningkatan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Masyarakat Pesawaran"**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Namun, berkat adanya bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak, seluruh kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta pertolongannya dalam setiap langkah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibunda tercinta, sosok terhebat yang senantiasa hadir dalam setiap perjalanan hidup penulis, sosok yang selalu memberikan kasih sayang tulus tanpa pamrih, serta kekuatan melalui doa-doa yang tidak pernah putus dipanjatkan dan mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Mamak, penulis mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, keikhlasan, keberanian, dan pembelajaran hidup yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah mempercayai penulis, serta setia mendampingi penulis dalam melewati setiap proses dan berbagai hal yang terjadi selama perjalanan ini. Penulis sangat bersyukur karena dapat hidup dan tumbuh sebagai anak Mamak. Penulis berharap Allah SWT. selalu memberikan mamak kehidupan yang baik, umur yang penuh keberkahan, kesehatan, serta kebahagiaan yang

melimpah. Penulis juga berharap Allah SWT. mengizinkan Mamak untuk selalu kebersamai penulis dan adik-adik lebih lama lagi, agar dapat menyaksikan setiap pencapaian yang membanggakan di masa mendatang, serta bersama-sama mewujudkan impian-impian yang selama ini selalu kita bicarakan menjadi kenyataan. Terima kasih karena telah begitu kuat menjadi *single parent* super wonder women ku.

3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing utama, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan yang telah Ibu berikan selama masa perkuliahan, khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur karena Ibu senantiasa memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi, serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menuangkan gagasan ke dalam bahasa akademik yang lebih baik. Semangat dan motivasi yang terus Ibu berikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis hingga mampu menyelesaikan proses ini. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam kehidupan, agar dapat terus menebarkan kebaikan melalui ilmu yang diberikan, serta semoga karier dan pengabdian Ibu di dunia pendidikan senantiasa dilimpahi kesuksesan.
4. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, kesabaran, dan ketulusan yang telah Ibu berikan selama mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih atas arahan yang diberikan dalam menyempurnakan substansi penelitian, sekaligus membentuk penulis untuk berpikir lebih kritis, terstruktur, dan analitis. Penulis menyadari bahwa Ibu memiliki peran yang sangat besar dalam setiap tahapan penyusunan penelitian ini. Semoga setiap ilmu dan pengabdian yang Ibu berikan senantiasa membawa keberkahan, serta menghadirkan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap langkah Ibu di dunia pendidikan.
5. Mrs Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ph.D. selaku Dosen Penguji Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kritik, saran,

dan masukan yang diberikan sejak seminar proposal hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis merasa sangat bersyukur dan merasa terhormat karena memperoleh kesempatan untuk mendapatkan arahan langsung dari Mrs Devi. Setiap pandangan serta masukan yang diberikan menjadi pembelajaran yang sangat berarti dalam menyempurnakan kekurangan yang masih terdapat dalam penelitian ini. Semoga ilmu, kebaikan, dan ketulusan yang senantiasa diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir, serta membawa keberkahan dan kesuksesan dalam setiap langkah karir kehidupan Mrs Devi.

6. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu pengetahuan, pengalaman, serta dedikasi yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana. Semoga segala ilmu dan pengabdian yang senantiasa dicurahkan menjadi amal kebaikan serta membawa kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu dosen.
9. Seluruh staf jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, khususnya Mbak Uki dan Mbak Vivi, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, perhatian, dan pelayanan yang tulus dalam setiap proses administrasi, terutama selama penyelesaian tugas akhir ini. Keramahan serta kebaikan yang diberikan sangat berarti bagi penulis. Semoga segala kebaikan tersebut menjadi berkah dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat.
10. Kemendikbudristek, khususnya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) selaku pihak yang mengelola, menetapkan, dan menyalurkan bantuan KIP Kuliah, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada akun Twitter @pecanduimpian yaitu Kak Fal serta kanal YouTube dibidikmisi.com yang senantiasa membagikan informasi, panduan, dan

pembaruan terkait KIP Kuliah secara jelas dan bermanfaat. Informasi tersebut sangat membantu penulis dalam memahami setiap proses yang harus dilalui. Penulis sangat bersyukur karena melalui program ini dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Penulis berharap program ini terus memberikan manfaat bagi banyak mahasiswa lainnya, dan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi ladang pahala bagi semua pihak yang terlibat.

11. Disdukcapil Kabupaten Pesawaran, khususnya Bang Edi, Mbak Sari, Pak Tomi, Pak Hendra, Bang Mau, Mbak Yanti beserta seluruh staf dan masyarakat yang telah bersedia menjadi informan, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dalam proses pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Disdukcapil Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang, khususnya kepada Mbak Dwi, Mbak Nia, Kak Desi, Mbak Elin, Mbak Lisa, Mbak Nanda, dan seluruh staf pelayanan yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran, serta perhatian yang begitu berarti bagi penulis. Semoga seluruh kebaikan yang diberikan dibalas dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
12. Adik-adik tersayang penulis, adik perempuan penulis yang paling cantik Raines, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi tempat bercerita yang begitu baik, atas perhatian dan doa yang diberikan, serta atas keikhlasan dalam mendukung penulis untuk meninggalkan rumah demi melanjutkan pendidikan. Terima kasih pula atas segala kesabaran yang telah diberikan selama ini. Untuk adik kecil penulis yang tampan Revan dan ezha, terima kasih karena selalu menghadirkan tawa dan menjadi pelipur bagi penulis ketika merasa lelah dalam menjalani proses ini. Kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis dengan memberikan semangat melalui hal-hal sederhana yang begitu berarti. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi setiap langkah kalian, memberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam mewujudkan segala impian.

13. Orang-orang terkasih penulis, Alm. Mbah Uti, Mbah Kakung, Aby, Bapak, Bude Sum, Bule Aseh, Om Nar, dan seluruh keluarga besar Mbah Cawes, serta Mas Awan, Mbak Desti dan seluruh keluarga besar Mbah Darno, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan, baik melalui doa maupun bantuan materi. Terima kasih atas kepercayaan yang senantiasa diberikan kepada penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini, serta atas setiap masukan dan pengingat yang diberikan agar penulis tidak salah dalam melangkah. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebahagiaan dan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi ladang pahala bagi kalian semua.
14. Teruntuk member serangkai, Nay, Nened, dan Amrinong, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menerima penulis sebagai bagian dari kalian bertiga yang telah bersama sejak masa PKKMB. Terima kasih kepada Nay yang selalu bersedia menemani penulis ketika membutuhkan teman untuk bepergian, kepada Nened yang dengan ceplas-ceplosnya mampu mencairkan suasana, serta kepada Amrinong yang selalu hadir dengan keceriaan dan berbagai ide dalam setiap pertemuan. Penulis juga berterima kasih karena kalian selalu mengajak penulis untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama, meskipun penulis tidak selalu dapat ikut, namun kalian tidak pernah berhenti untuk merangkul penulis dalam pertemanan ini. Perhatian kecil seperti saling mengingatkan tugas, mencadangkan bangku di kelas, perjalanan dengan Tayo mengelilingi Unila, hingga obrolan-obrolan ringan akan selalu menjadi kenangan yang dirindukan oleh penulis. Semoga kalian senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan serta kelancaran oleh Allah SWT dalam meraih cita-cita yang diimpikan, dan semoga komunikasi serta silaturahmi di antara kita tetap terjaga dengan baik di masa yang akan datang.
15. Member kost life, Della, Vina, dan Suyen, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi keluarga di perantauan. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang penuh makna, canda tawa yang kalian hadirkan, serta kesediaan untuk mendengarkan setiap cerita, keluh kesah, dan berbagai sudut pandang yang menjadi pelajaran baru bagi penulis. Terima

kasih karena telah hadir dalam perjalanan ini. Semoga rasa kekeluargaan yang telah terjalin dapat tetap terjaga di masa depan. Di mana pun kalian berada, semoga selalu dipertemukan dengan lingkungan yang sehat, suportif, dan baik bagi pertumbuhan diri kalian, serta semoga karier kalian senantiasa bersinar dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT.

16. Teruntuk IAPA FAM yaitu Mbak Noyy dan Reza, penulis mengucapkan terima kasih karena selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan revisi dan untuk tidak berhenti menjalani proses bimbingan. Kehadiran kalian dengan penuh canda tawa juga sangat berarti karena membuat penulis tidak merasa terlalu berat menjalani masa-masa sebagai mahasiswa tingkat akhir. Penulis juga berterima kasih karena kalian telah menjadi partner bertukar pikiran yang baik, sekaligus rekan yang menyenangkan dalam perjalanan sebagai finalis *Writing Competition* IAPA di Yogyakarta, yang menjadi pengalaman begitu *memorable* bagi penulis. Kalian adalah pribadi yang luar biasa. Semoga perjalanan ke depan dalam meraih cita-cita senantiasa diberikan kemudahan, dan semoga hubungan pertemanan ini tetap terjalin dengan baik.
17. Teruntuk penghuni *student corner* upt tik, Isnaini dan Aldiansyah Pratama, penulis mengucapkan terima kasih karena menjadi teman sebaya yang sangat nyaman untuk diajak berdiskusi ketika penulis kehilangan arah dalam menyelesaikan skripsi, berdiskusi mengenai berbagai lomba esai, serta saling berbagi informasi mengenai perlombaan yang memberikan banyak pengalaman pertama bagi penulis. Penulis juga berterima kasih atas setiap pengalaman berharga yang telah dilalui bersama, termasuk membantu mewujudkan impian penulis untuk dapat release pada Instagram @officially.unila. Terima kasih karena selalu mengajak, mempercayai, dan menjadikan penulis sebagai bagian dari perjalanan itu. Semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam meraih mimpi-mimpi, memperoleh banyak pencapaian yang membanggakan di masa depan, dan selalu disertai kabar baik dalam setiap langkah kehidupan.
18. Teruntuk Ngah Rayo, penulis mengucapkan terima kasih karena melalui bantuan beliau penulis memperoleh kesempatan untuk bekerja di Fotokopi

Abdi pada masa ketika penulis benar-benar membutuhkan dukungan finansial. Penulis juga berterima kasih karena Raya telah menjadi rekan kerja yang baik, penuh pengertian, serta mampu diajak bekerja sama dengan baik, termasuk ketika penulis harus bergantian waktu untuk ke kampus melakukan bimbingan. Kepada Om dedy selaku pemilik Fotokopi Abdi, penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan pengertian yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat menghargai kesempatan yang diberikan untuk tetap menyelesaikan revisi dengan menggunakan fasilitas komputer di tempat tersebut. Semoga usaha yang dijalankan senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan, dapat terus membantu banyak orang, serta semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kebaikan dalam setiap langkah kehidupan.

19. Cucu-cucu Mbah Taslim yaitu Fatiya, Raras, Nova, Dini, Malvin, dan Rizky, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan yang telah diberikan selama ini. Semoga hubungan kekeluargaan yang telah terjalin dapat senantiasa terjaga dengan baik, serta kebersamaan ini tetap membawa kebahagiaan di masa yang akan datang.
20. Teman-teman Ampatra, khususnya Reguler D, serta para mahasiswa pembahas penulis yaitu April, Betris, Amrina, dan Ridha, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan, dukungan, serta masukan yang diberikan kepada penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini. Setiap saran yang diberikan menjadi bagian berarti dalam proses penyempurnaan penelitian ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan dalam setiap langkah kalian.
21. Sahabat terbaik penulis, Dela Puspita Sari, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kesediaannya untuk selalu mendengarkan setiap keluh kesah penulis hingga saat ini. Semoga kebersamaan ini senantiasa terjaga, dan semoga Dela selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan.
22. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini,

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

23. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Nadia Eva Prasanti. Terima kasih karena telah berani bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun harus melalui tangisan, rasa takut, kecemasan, dan ketidakpercayaan diri yang sempat hadir dalam perjalanan ini. Penulis bersyukur karena tidak memilih berhenti di tengah jalan dan tetap berusaha melangkah hingga sampai pada titik ini. Penulis berharap Allah SWT. senantiasa memberikan keberkahan pada setiap keputusan baik yang diambil, serta menjadikan setiap langkah penulis sebagai jalan untuk menebarkan kebaikan dan memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar.

Bandar Lampung, 27 April 2026

Nadia Eva Prasanti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kebijakan Publik.....	17
2.3 Manajemen Strategis.....	19
2.3.1 Pengertian Manajemen Strategis.....	19
2.3.2 Manajemen Strategis Dalam Sektor Publik.....	20
2.3.3 Tahapan Manajemen Strategis.....	22
2.4 Formulasi Strategis.....	25
2.4.1 Pengertian Formulasi Strategi.....	25
2.4.2 Re-Formulasi Strategi.....	26
2.4.3 Tahapan Formulasi Strategi.....	27
2.5 Identitas Kependudukan Digital.....	36
2.6 Kerangka Pikir.....	38
<b>III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>

3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Fokus Penelitian.....	41
3.3 Lokasi Penelitian.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Teknik Analisis Data.....	49
3.6 Teknik Keabsahan Data .....	52
<b>IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Gambaran Umum.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran.....	54
4.1.2 Gambaran Umum Disdukcapil Kabupaten Pesawaran .....	56
4.1.3 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital .....	62
4.2 Hasil Penelitian .....	64
4.2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Disdukcapil Kabupaten Pesawaran.....	64
4.2.2 Strategi Peningkatan IKD Yang Telah Dilakukan Disdukcapil Pesawaran .....	67
4.2.3 Faktor Eksternal Disdukcapil Kabupaten Pesawaran .....	80
4.2.4 Faktor Internal Disdukcapil Kabupaten Pesawaran .....	96
4.3 Pembahasan.....	125
4.3.1 Analisis Kesesuaian Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Disdukcapil Kabupaten Pesawaran dalam Mendukung Peningkatan Kepemilikan IKD .....	125
4.3.2 Analisis Lingkungan Strategis Disdukcapil Kabupaten Pesawaran dalam Implementasi IKD .....	133
4.3.3 Posisi Strategis Disdukcapil Kabupaten Pesawaran dalam Peningkatan Kepemilikan IKD .....	161
4.3.4 Evaluasi dan Optimalisasi Strategi Peningkatan Kepemilikan IKD .....	168
<b>V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>171</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>176</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>181</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Pesawaran .....	6
2. Penelitian Terdahulu .....	13
3. <i>External Factor Analysis Summary</i> (EFAS) .....	29
4. <i>Internal Factor Analysis Summary</i> (IFAS) .....	31
5. Data Informan dalam Penelitian.....	45
6. Dokumentasi .....	48
7. Status Pekerjaan Utama Masyarakat Pesawaran.....	54
8. Rekapitulasi Pelaksanaan Pak Tuah Tahun 2025.....	75
9. Pekerjaan Utama Masyarakat Pesawaran Per Kecamatan .....	81
10. Presentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2025. ....	82
11. Jumlah Penduduk Pesawaran Berdasarkan Umur (Tahun).....	84
12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Rekam Cetak KTP .....	92
13. Matrik Hasil Penelitian .....	119
14. Matrik Pembahasan Lingkungan Eksternal .....	139
15. Matrik Pembahasan Lingkungan Internal .....	150
16. Kondisi Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal Dukcapil Kabupaten Pesawaran Renstra 2020-2024.....	153
17. Pencermatan Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal .....	155
18. <i>External Factor Analysis Summary</i> (EFAS) .....	157

19. <i>Internal Factor Analysis Summary</i> ((IFAS).....	159
20. Matrik TOWS .....	163
21. Tabel Triangulasi Data.....	191

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Matriks TOWS .....	32
2. Diagram SWOT .....	33
3. Kerangka Pikir .....	40
4. Komponen dalam analisis data ( <i>Interactive model</i> ).....	50
5. Jenis Pekerjaan Utama Masyarakat Pesawaran.....	55
6. Struktur organisasi Dukcapil Kabupaten Pesawaran .....	59
7. Alur Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Pesawaran.....	70
8. Jadwal Pelayanan Perekaman KTP-el dan KTP Digital (IKD) .....	71
9. PAK TUAH Sebagai Inovasi Disdukcapil Kabupaten Pesawaran .....	74
10. PAK TUAH di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau .....	78
11. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Rasio Ketergantungan.....	85
12. Ketersediaan Perangkat Komputer.....	89
13. Jumlah Aktivasi IKD Masyarakat Pesawaran Tahun 2025.....	93
14. Perlengkapan Jemput Bola/Pak Tuah.....	102
15. Mesin Cetak KTP.....	105
16. SOP Aktivasi IKD Disdukcapil Kabupaten Pesawaran.....	108
17. Penjelasan IKD Oleh Petugas .....	109
18. Informasi Tahapan Aktivasi IKD di Media Sosial Disdukcapil Kabupaten Pesawaran .....	111
19. Informasi IKD di Media Sosial Disdukcapil Pesawaran.....	115
20. Pemetaan Pada Diagram SWOT .....	162
21. Surat Izin Penelitian Disdukcapil Kabupaten Pesawaran .....	182
22. Excel Perhitungan EFAS dan IFAS .....	183

23. Wawancara dengan Bapak T, Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan pada 9 November 2025 .....	184
24. Wawancara dengan Bapak H, selaku Sekretaris Dinas Dukcapil Pesawaran, pada 4 Desember 2025.....	184
25. Rating SWOT dengan Bapak W, Kepala Sub Bagian Keuangan pada 4 Desember 2025 .....	185
26. Rating SWOT dengan Bapak M, Administrator Database Bidang Pendaftaran Kependudukan pada 4 Desember 2025 .....	185
27. Rating SWOT dengan Ibu S, Administrator Database Bidang PIAK pada 4 Desember 2025 .....	186
23. Rating SWOT dengan Bapak E, selaku Operator Bidang PIAK Dukcapil Pesawaran, Pada 4 Desember 2025.....	186
24. Wawancara dengan Bapak D, selaku Staf Bidang Pendaftaran Kependudukan pada 4 Desember 2025.....	187
25. Wawancara dengan Mba L selaku Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang Baru Aktivasi IKD pada 7 November 2025 .....	187
26. Wawancara dengan Mba H, selaku Masyarakat Kabupaten Pesawaran Yang Baru Aktivasi IKD pada 4 Desember 2025.....	188
27. Wawancara dengan A, selaku Masyarakat Kabupaten Pesawaran Yang Baru Aktivasi IKD pada 9 November 2025 .....	188
27. Wawancara dengan K, selaku Masyarakat Kabupaten Pesawaran Yang Baru Aktivasi IKD pada 9 November 2025 .....	189

## DAFTAR SINGKATAN

IKD	Identitas Kependudukan Digital
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
DISDUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PAK TUAH	Pendaftaran Administrasi Kependudukan Turun Kebawah
PERMENDAGRI	Peraturan Kemeterian Dalam Negeri
KEMENDAGRI	Kementerian Dalam Negeri
ADMINDUK	Administrasi Kependudukan
SEKDIS	Sekretaris Dinas
KABID	Kepala Bidang
RENSTRA	Rencana Strategis
SOP	Standar Operasional Prosedur
DAFDUK	Pendaftaran Kependudukan
PIAK	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
KTP-el	Kartu Tanda Penduduk Elektronik

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan *e-government*. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap penyelenggaraan *e-government* dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengharuskan setiap instansi pelayanan publik untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam proses kerjanya guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan (Yulanda, 2023). Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi digital di bidang administrasi kependudukan (Rakornas Dukcapil, 2025).

IKD merupakan bentuk digital dokumen kependudukan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan data, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Kehadirannya sejalan dengan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dengan demikian, IKD tidak hanya lahir sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai instrumen konkret dalam memperkuat pelayanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan efisien di era digital.

Kehadiran IKD menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan nasional dengan pelaksanaan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Kebijakan pemerintah terkait transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi landasan utama dalam mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk dalam sektor administrasi kependudukan. Dalam konteks ini, IKD tidak hanya dipahami sebagai inovasi layanan, tetapi secara lebih spesifik merupakan program pemerintah yang dirancang sebagai bentuk implementasi konkret dari kebijakan transformasi digital tersebut. Program IKD diwujudkan dalam bentuk aplikasi layanan kependudukan berbasis digital yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap identitas kependudukan secara elektronik.

Penguatan terhadap penyelenggaraan program IKD semakin jelas dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, serta Blanko KTP-el dan Penyelenggaraan IKD. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan program IKD di seluruh Indonesia. Dengan demikian, setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di daerah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan program tersebut. Dalam pelaksanaannya, masing-masing Disdukcapil perlu memiliki strategi yang tepat dan kontekstual sebagai upaya untuk merealisasikan program IKD secara efektif, sehingga tujuan digitalisasi administrasi kependudukan dapat tercapai secara optimal di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan implementasi IKD, strategi yang dimaksud merujuk pada keputusan Disdukcapil dalam merancang langkah-langkah percepatan aktivasi IKD melalui pendekatan yang bersifat proaktif. Pendekatan ini kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan pelayanan yang langsung menysasar masyarakat, seperti pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara intensif, layanan jemput bola (*door to door*), serta pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga perbankan dan instansi lainnya untuk mendukung pemanfaatan IKD (Fatih, 2025).

Pada tingkat nasional, Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri menetapkan strategi utama dalam penyelenggaraan IKD melalui penentuan sasaran kinerja berupa target aktivasi IKD minimal sebesar 30% dari jumlah penduduk Indonesia yang telah melakukan perekaman KTP-el pada tahun 2025 (Disdukcapil PPK, 2025). Target nasional tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi acuan bagi seluruh Disdukcapil di tingkat daerah, sehingga menuntut setiap Disdukcapil daerah untuk memiliki strategi yang kontekstual berbasis pendekatan proaktif dalam meningkatkan kepemilikan IKD di masyarakat. Penetapan target ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator capaian program, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong percepatan adopsi layanan digital di bidang administrasi kependudukan. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah pusat mengimplementasikan berbagai langkah strategis, antara lain penguatan regulasi terkait keamanan data, pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat melalui program edukasi, serta penguatan aspek perlindungan data pribadi (Dukcapil Kemendagri, 2024), sehingga Disdukcapil tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam memastikan transformasi digital kependudukan berjalan secara masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia (Lampungprov, 2024).

IKD memberikan sejumlah manfaat strategis bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat, IKD memudahkan akses terhadap seluruh berkas administrasi kependudukan tanpa perlu membawa dokumen fisik, mempercepat proses layanan publik karena data sudah terintegrasi, serta memberikan kemudahan dalam mengakses informasi keluarga melalui fitur Kartu Keluarga digital. Kehadiran IKD juga menjadi solusi atas keterbatasan blanko KTP-el yang kerap menjadi kendala di daerah (Sasongko, 2023). Dari sisi keamanan, sistem enkripsi dan autentikasi yang digunakan membuat IKD mampu melindungi data pribadi dari risiko pemalsuan maupun penyalahgunaan identitas (Hanjani, 2025). Selain itu, penerapan IKD membantu mengatasi berbagai persoalan pelayanan adminduk konvensional, seperti keterlambatan pencetakan, kualitas cetakan yang kurang baik, hingga risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik (Angkat, 2017).

Manfaat IKD juga sejalan dengan tujuan implementasi SPBE. Integrasi data kependudukan melalui IKD mendukung percepatan transformasi digital di sektor publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan IKD dapat dipandang sebagai salah satu bentuk nyata penerapan SPBE, karena mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, kehadiran IKD tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif. Meskipun penerapan IKD dan SPBE memberikan berbagai manfaat signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, implementasinya di lapangan masih menghadapi beragam kendala. Realitas ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam birokrasi bukanlah proses yang sederhana, melainkan menuntut kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta tata kelola yang konsisten. Oleh karena itu, tantangan yang muncul dalam penerapan SPBE turut berpengaruh terhadap realisasi IKD di berbagai daerah.

Beberapa penelitian telah mengungkap hambatan nyata dalam penerapan SPBE di Indonesia. Boy & Ariawan (2023) menyoroti ketimpangan infrastruktur digital, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta perlindungan keamanan data yang belum optimal sebagai tantangan mendasar. Hal ini sejalan dengan temuan Aprianto dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa sekitar 50% anggaran instansi pemerintah tidak tepat sasaran, ditandai dengan pengadaan perangkat lunak sejenis, rendahnya utilisasi server dan pusat data di bawah 40%, serta masih kuatnya ego sektoral antar instansi. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi SPBE berjalan tidak sepenuhnya optimal dan memperlebar kesenjangan layanan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dalam penelitian Hadi & Widyani (2025), tantangan implementasi SPBE dianalisis melalui penggunaan Indeks SPBE yang dirancang untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaannya di Indonesia. Indeks ini mencakup tiga indikator utama yaitu aspek tata kelola dan kebijakan, aspek infrastruktur teknologi yang meliputi ketersediaan jaringan internet yang merata, pembangunan pusat data

nasional, dan kecukupan server yang mampu menunjang kebutuhan digital instansi pusat maupun daerah. Kemudian terdapat aspek sumber daya manusia dan literasi digital, di mana keberhasilan SPBE ditentukan oleh kemampuan teknis serta kepemimpinan digital aparatur sipil negara, tingkat literasi digital masyarakat umum, serta adanya kepemimpinan kolaboratif yang mengesampingkan ego sektoral dan mendorong kerjasama lintas instansi agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara bersama.

Berbagai hambatan dalam implementasi SPBE tersebut juga tercermin pada pelaksanaan inovasi pelayanan publik berbasis digital, salah satunya melalui IKD yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Sejumlah studi empiris memperkuat hal ini. Penelitian Sihombing et al. (2025) di Kabupaten Dairi menemukan bahwa keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kendala teknis seperti lupa PIN atau kesalahan verifikasi menjadi hambatan utama dalam aktivasi IKD. Kondisi serupa juga diidentifikasi oleh Rifqi & Wijaya (2025) di Kota Pekanbaru, di mana lemahnya infrastruktur jaringan provider menghambat proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi. Di Kota Malang, Amanda dkk (2025) menekankan bahwa keberhasilan implementasi IKD bergantung pada kapasitas aparatur, efektivitas sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas instansi yang masih belum optimal. Sementara itu, studi Madaul dkk (2025) di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan realisasi aktivasi IKD yang rendah akibat minimnya sosialisasi dan keterbatasan sarana teknologi di daerah.

Secara garis besar, hambatan-hambatan yang muncul implementasi SPBE dan IKD dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami dan mengoperasikan sistem digital, lemahnya koordinasi lintas bidang di lingkungan birokrasi, serta belum optimalnya mekanisme evaluasi dan tindak lanjut strategi implementasi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi ketimpangan infrastruktur jaringan internet antarwilayah, rendahnya literasi digital masyarakat, serta minimnya sarana teknologi dan dukungan lingkungan eksternal terhadap

penerapan layanan digital. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan secara langsung memengaruhi keberhasilan strategi implementasi IKD di tingkat daerah..

Berdasarkan data jumlah aktivasi IKD pada 26 Februari 2024, tercatat sebanyak 8.209.727 pengguna IKD dari 514 kabupaten/kota, dan jumlah ini meningkat menjadi 14.328.091 pengguna pada April 2025 (Rakornas, 2025). Namun, tingkat aktivasi IKD belum merata di seluruh daerah. Di Provinsi Lampung, meskipun kepemilikan KTP-el telah mencapai 98,29%, tingkat aktivasi IKD masih tergolong rendah, yaitu sekitar 5,22% dari total wajib KTP-el (Wiguna, 2024). Rendahnya capaian tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan salah satu kabupaten dengan tingkat aktivasi IKD yang masih rendah adalah Kabupaten Pesawaran.

**Tabel 1. Data Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Pesawaran**

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP (Jiwa)	Jumlah Target IKD	Pengguna IKD (Jiwa)	Presentase (%) Dari Target	Rasio Pertumbuhan
2023	355.269	88.817	3.142	3,5%	-
2024	357.940	89.485	9.230	10%	193%
2025	359.001	107.700	13.037	12%	41%

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 1, jumlah aktivasi IKD di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025, namun pencapaiannya masih jauh dari target nasional sebesar 30% dari total penduduk wajib KTP. Pada tahun 2023, jumlah pengguna IKD baru mencapai 3%. Angka tersebut naik menjadi 10% pada tahun 2024 dan 12% pada tahun 2025. Meskipun terjadi kenaikan jumlah pengguna, jika dilihat dari rasio pertumbuhan, peningkatan yang terjadi justru menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 193% pada tahun 2023–2024 tidak dapat dipertahankan pada periode 2024–2025, yang hanya mencapai 41%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan positif, tingkat adopsi IKD di Pesawaran masih belum optimal. Kesenjangan antara capaian aktual dengan target nasional inilah yang menjadi

alasan penting mengapa Pesawaran perlu dikaji lebih mendalam, terutama dalam hal strategi yang dapat mempercepat dan memperluas aktivasi IKD di tingkat daerah.

Upaya peningkatan kepemilikan IKD sebenarnya telah dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Pesawaran melalui beberapa strategi pelayanan. Berdasarkan hasil pra-riset didapatkan peneliti melalui wawancara langsung pada tanggal 30 April 2025 dengan dua orang staf dari bidang yang berbeda, diketahui bahwa Disdukcapil telah menerapkan beberapa strategi untuk mendorong aktivasi IKD di masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mewajibkan masyarakat yang melakukan pencetakan ulang KTP maupun perekaman KTP untuk mengunduh dan mengaktifkan aplikasi IKD. Selain itu, aktivasi IKD juga diintegrasikan dalam strategi jemput bola yang dikenal dengan Pendaftaran Administrasi Kependudukan Turun ke Bawah (PAK TUAH), yang bertujuan mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di tingkat desa. Meskipun demikian, secara umum strategi yang telah diterapkan tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepemilikan IKD secara luas dan merata, sehingga menunjukkan bahwa implementasi strategi yang ada masih memerlukan penguatan dan optimalisasi agar dapat mencapai target yang diharapkan.

Namun, strategi yang telah dilakukan menghadapi beberapa kendala di lapangan. Pada strategi PAK TUAH, kendala yang dialami antara lain masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat yang enggan mengunduh aplikasi karena dianggap merepotkan, rendahnya permintaan aktivasi IKD saat PAK TUAH dilaksanakan, serta keterbatasan akses jaringan internet di beberapa desa. Selain itu, berdasarkan keterangan staf, strategi pelayanan jemput bola atau PAK TUAH pada dasarnya bersifat responsif, yaitu layanan akan dilaksanakan apabila terdapat permintaan dari masyarakat, pemerintah desa, maupun pihak legislatif daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung pasif dan belum sepenuhnya berbasis inisiatif aktif dari pihak Disdukcapil, kecuali pada momen-momen tertentu seperti menjelang pemilihan umum. Akibatnya, frekuensi pelaksanaan PAK TUAH tidak berjalan secara rutin dan berdampak pada terbatasnya jangkauan pelayanan aktivasi IKD di masyarakat. Strategi

jemput bola atau PAK TUAH ini juga belum didukung dengan segmentasi target yang jelas, baik berdasarkan kelompok usia maupun wilayah prioritas, serta belum dioptimalkannya kolaborasi strategis dengan pihak-pihak potensial seperti pemerintah desa, sekolah, dan kecamatan, sehingga potensi perluasan cakupan layanan belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, dalam penelitian Imada (2025), strategi jemput bola yang dilaksanakan secara aktif, terstruktur, dan terencana mampu meningkatkan kepemilikan IKD hingga 95% dari kondisi sebelumnya, sehingga perbedaan capaian ini menunjukkan adanya kesenjangan efektivitas implementasi strategi yang menjadi salah satu alasan penting perlunya pengkajian dan optimalisasi strategi di Kabupaten Pesawaran.

Di sisi lain, strategi yang mengintegrasikan aktivasi IKD dengan layanan administrasi kependudukan di kantor Disdukcapil dinilai relatif lebih efektif dalam mendorong masyarakat untuk melakukan aktivasi, terutama pada kelompok masyarakat usia muda yang baru pertama kali melakukan perekaman KTP-el, di mana sebagian besar dari mereka bersedia langsung mengaktifkan aplikasi IKD. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang datang untuk mengurus layanan lain, seperti pengurusan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang belum terintegrasi secara daring, juga diarahkan untuk melakukan aktivasi IKD agar data kependudukan dapat terhubung secara otomatis dengan sistem layanan digital. Namun demikian, efektivitas strategi ini masih bersifat terbatas karena jangkauannya hanya mencakup masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil untuk layanan tertentu, sehingga belum mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Padahal, masih terdapat berbagai jenis layanan administrasi kependudukan lainnya, seperti pengurusan Kartu Keluarga, yang berpotensi untuk diintegrasikan dengan aktivasi IKD sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam mengakselerasi peningkatan kepemilikan IKD.

Kendala teknis yang paling sering ditemui adalah perangkat telepon genggam milik masyarakat yang tidak mendukung aplikasi IKD, misalnya karena kapasitas penyimpanan penuh atau sistem operasi yang tidak kompatibel. Sementara itu, kendala non-teknis muncul dari sikap sebagian masyarakat yang enggan

melakukan aktivasi karena merasa kesulitan memahami cara penggunaan aplikasi. Rendahnya literasi digital, terutama di kalangan usia lanjut, menjadi faktor yang cukup signifikan dalam memperlambat proses optimalisasi strategi ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan perilaku masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan strategi yang lebih adaptif dan komprehensif.

Informasi tambahan diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data pada tanggal 30 April 2025. Staf tersebut menegaskan bahwa capaian aktivasi IKD di Kabupaten Pesawaran hingga saat ini masih tergolong sangat rendah dan belum mendekati target nasional yang telah ditetapkan. Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh strategi yang ada belum dijalankan secara masif, salah satunya program PAK TUAH yang dinilai belum optimal karena keterbatasan anggaran serta pola pelaksanaan yang masih menunggu permintaan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target nasional dengan realisasi di tingkat daerah, yang mengindikasikan bahwa strategi yang diterapkan belum berjalan secara efektif.

Masyarakat Kabupaten Pesawaran seharusnya dapat merasakan sejumlah manfaat praktis dari adanya IKD, salah satunya yaitu efisiensi waktu karena proses aktivasi IKD dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 (lima) menit apabila didukung jaringan internet yang stabil. Keberadaan IKD juga menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan alat cetak KTP-el di Kabupaten Pesawaran yang hanya memiliki satu unit mesin cetak, sehingga antrean pencetakan dapat memakan waktu 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari. Selain itu, IKD juga berpotensi menjadi solusi dalam mengatasi persoalan apabila terjadi kembali kekosongan stok blangko, sebagaimana pernah dialami pada tahun 2019 ketika Disdukcapil harus mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti KTP-el (KupasTuntas.co, 2019). Dengan berbagai manfaat tersebut, optimalisasi strategi dalam meningkatkan kepemilikan IKD menjadi semakin penting agar masyarakat dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis digital.

Permasalahan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa strategi yang telah diterapkan di Kabupaten Pesawaran masih mencatat rendahnya tingkat aktivasi IKD di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam strategi yang telah dijalankan, mengidentifikasi kendala-kendala yang ada, serta merumuskan strategi alternatif yang lebih adaptif dan berpotensi meningkatkan kepemilikan IKD di masyarakat. Pentingnya kajian terhadap strategi ini juga sejalan dengan pandangan Grindle (1980) dalam buku (Subarsono, 2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua aspek utama, yakni *content of policy* dan *context of implementation*. Dalam *context of implementation*, strategi yang dimiliki oleh para aktor pelaksana menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan efektivitas pencapaian kebijakan atau program.

Dukungan terhadap pentingnya strategi juga ditunjukkan oleh temuan Imada (2025), yang mengungkap bahwa penerapan strategi jemput bola, layanan aktivasi hingga malam hari, serta sosialisasi yang masif mampu mendorong peningkatan aktivasi IKD hingga 96% dari tahun sebelumnya. Hal serupa disampaikan oleh Suwarno (2025), yang menemukan bahwa keberhasilan awal dalam peningkatan aktivasi IKD justru menurun drastis akibat minimnya strategi pendampingan lanjutan, sehingga menegaskan perlunya pendekatan strategis yang berkelanjutan. Kedua temuan tersebut memperkuat argumen bahwa strategi yang dirancang dan dijalankan oleh pelaksana kebijakan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan implementasi program IKD.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya angka aktivasi IKD di Kabupaten Pesawaran menandakan perlunya analisis terhadap strategi yang telah dijalankan serta penyesuaian strategi agar lebih adaptif dan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Optimalisasi Strategi Peningkatan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Masyarakat Pesawaran” yang difokuskan untuk mengidentifikasi letak ketidakefektifan strategi yang sedang berjalan, kemudian memberikan rekomendasi untuk optimalisasi strategi peningkatan IKD masyarakat Pesawaran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana strategi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)?
2. Bagaimana strategi yang lebih optimal dapat dirumuskan untuk meningkatkan kepemilikan IKD di Kabupaten Pesawaran?

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Merujuk pada penjelasan penelitian ini sebelumnya, sehingga manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam memahami penyusunan formulasi strategi pada organisasi publik.
2. Manfaat Praktis: secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi strategis bagi Disdukcapil Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan kepemilikan IKD. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada perbaikan strategi yang sudah dijalankan, tetapi juga menawarkan alternatif strategi yang lebih optimal terhadap kondisi masyarakat setempat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, maupun perencanaan program kerja yang lebih tepat sasaran.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan kepemilikan IKD.
2. Memberikan rekomendasi optimalisasi strategi yang dapat mendukung peningkatan kepemilikan IKD masyarakat Pesawaran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti sebagai dasar penguatan teori. Berbagai studi sebelumnya dijadikan rujukan agar pembahasan lebih komprehensif. Untuk memperjelas uraian, rangkuman hasil penelitian terdahulu yang relevan disajikan dalam bentuk tabel berikut.

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Optimalisasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, M.Asyraf Fatih (2025)	Penelitian yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan teori optimalisasi Hotniar Siringoringo (2005) ini menunjukkan bahwa tingkat aktivasi IKD masih sangat rendah, yakni hanya 3,47% dari target 30%. Hambatan utamanya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan perangkat, serta jaringan yang belum memadai. Disdukcapil memiliki strategi peningkatan berupa layanan jemput bola, sosialisasi, dan kerja sama dengan pihak eksternal.	Perbedaan dari penelitian ini berada pada fokus kajian dan pendekatan teori yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan teori optimalisasi Hotniar Siringoringo (2005) dengan menekankan pada analisis hambatan rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta strategi yang sudah dijalankan oleh Disdukcapil. Sementara itu, penelitian ini berlandaskan teori manajemen strategi dari Fred R. David yang secara khusus menitikberatkan pada proses formulasi strategi.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
2.	Upaya Peningkatan Cakupan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Oktavia Nadliroh Santoso (2024)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan peninjauan strategi pelayanan yang telah dilakukan oleh Disdukcapil meliputi pelayanan langsung di kantor, kecamatan, serta jemput bola melalui program kelurahan dan inovasi "ANTI MAGER". serta mengidentifikasi penghambat yang dialami selama menjalankan pelayanan aktivasi IKD.	Perbedaan dari penelitian ini berada pada orientasi kajian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada peninjauan strategi pelayanan yang telah dilaksanakan Disdukcapil, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan aktivasi IKD. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi Fred R. David dengan fokus pada tahap formulasi strategi. Penelitian ini secara spesifik dilakukan di Kabupaten Pesawaran dengan tujuan menyusun strategi optimalisasi yang lebih sistematis dan komprehensif guna meningkatkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital masyarakat.
3.	Studi Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kota Bandar Lampung Dan Kota Malang, Velly Bercilia Sandayu (2025)	Penelitian ini mengkaji responsivitas pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan membandingkan dua daerah, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Malang, menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori responsivitas Zeithaml et al. (1988). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat responsivitas pelayanan IKD di Kota Malang lebih baik dibandingkan Kota Bandar Lampung, meskipun masih terdapat kendala pada aspek ketepatan waktu pelayanan.	Perbedaan penelitian ini berada pada fokus analisis yang dilakukan. Penelitian ini berfokus pada aspek kualitas pelayanan, melainkan pada strategi peningkatan kepemilikan IKD di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen strategis dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta merumuskan strategi optimal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kondisi pelayanan, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepemilikan IKD secara lebih efektif.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
4.	Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Ikhwan Maulana Arief (2024).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis strategi yang sudah ada menggunakan 4 indikator Kooten. Hasil penelitian membahas strategi Disdukcapil dalam meningkatkan aktivasi IKD, yang telah dijalankan namun belum optimal karena terkendala pada proses implementasi. Strategi yang diterapkan meliputi layanan jemput bola, video call WhatsApp, serta pelatihan pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori Kooten dalam Salusu untuk menganalisis tipe-tipe strategi.	Perbedaan dari penelitian ini berada pada kerangka teori yang digunakan Penelitian terdahulu mengacu pada teori Kooten dalam Salusu dengan menggunakan empat indikator untuk menganalisis strategi yang telah dijalankan Disdukcapil. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi Fred R. David dengan titik berat pada tahap formulasi strategi. Penelitian ini tidak hanya menganalisis strategi yang telah ada, melainkan berupaya merumuskan strategi alternatif yang lebih komprehensif dan aplikatif.
5.	Efektivitas Program Pak Tua Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, Khansa Dewinta Kusuma, (2025)	Penelitian ini mengkaji efektivitas Program PAK TUAH di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teori efektivitas menurut Sutrisno (2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut berada dalam kategori efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek ketepatan waktu pelayanan.	Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran efektivitas program, melainkan pada analisis strategi peningkatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dalam penelitian ini, PAK TUAH diposisikan sebagai salah satu strategi implementatif, bukan sebagai objek utama penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori manajemen strategis David (2006) serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi optimal, sehingga memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi strategis, bukan sekadar pengukuran tingkat efektivitas.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
6.	Jemput Bola Terpadu: (Sebuah Analisis Strategi Optimalisasi Layanan Adminduk Di Kabupaten Sidoarjo), Rossi Maharani Suwandi, Meirinawati, (2024)	Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi dari Ramli dan Kartini yang mencakup perumusan visi dan misi, analisis faktor internal dan eksternal, perumusan strategi, pelaksanaan strategi, serta evaluasi dan pengendalian serta dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan dan mengevaluasi strategi optimalisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo berupa “JBT Sayang”.	Perbedaan dari penelitian ini berada pada landasan teori, fokus analisis, serta tujuan penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan teori manajemen strategi dari Ramli dan Kartini yang mencakup perumusan visi dan misi, analisis faktor internal dan eksternal, perumusan strategi, pelaksanaan strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Kajian tersebut mendeskripsikan sekaligus mengevaluasi strategi optimalisasi yang telah dijalankan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi dari Fred R. David dengan penekanan khusus pada tahap formulasi strategi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pesawaran dengan tujuan merumuskan strategi optimalisasi yang lebih terarah dan komprehensif untuk meningkatkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital masyarakat.

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025*

Berdasarkan Tabel 2, penelitian ini memiliki persamaan dengan sejumlah studi sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan dari penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan dalam penggunaan teori, fokus kajian, serta lokasi penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu berorientasi pada pemaparan strategi yang telah diterapkan oleh Disdukcapil di berbagai daerah, disertai identifikasi hambatan dan evaluasi implementasi, namun belum sampai pada tahap perumusan strategi baru. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya mengamati proses perumusan strategi yang telah ada, tetapi juga melakukan formulasi ulang strategi secara sistematis untuk menghasilkan alternatif rekomendasi strategis yang optimal.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dengan menyediakan rancangan strategi baru yang terukur, relevan, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

## **2.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik didefinisikan oleh Thomas R. Dye dalam buku (Subarsono, 2021) kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*), yang menunjukkan bahwa kebijakan mencakup tindakan maupun ketidakbertindakan pemerintah terhadap suatu isu. Sementara itu, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor pemerintah dalam menghadapi suatu permasalahan. William N. Dunn menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pola ketergantungan yang kompleks dari keputusan-keputusan kolektif yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk tidak bertindak. Berdasarkan pandangan ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang bersifat terarah dan sistematis dalam merespons permasalahan publik, yang tidak hanya mencakup tindakan nyata, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak, serta melibatkan proses yang kompleks dan saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan tertentu bagi kepentingan masyarakat luas.

Dalam prosesnya, kebijakan publik terbentuk melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Menurut William N. Dunn, tahapan kebijakan publik meliputi perumusan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahap perumusan masalah (*problem identification*) merupakan proses mengidentifikasi isu atau permasalahan yang membutuhkan intervensi pemerintah. Tahap formulasi kebijakan (*policy formulation*) merupakan proses penyusunan alternatif solusi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, tahap adopsi kebijakan (*policy adoption*) merupakan proses penetapan kebijakan oleh pihak yang berwenang melalui regulasi atau keputusan resmi. Tahap implementasi kebijakan

(*policy implementation*) merupakan proses pelaksanaan kebijakan oleh instansi terkait, sedangkan tahap evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada tahap implementasi, kebijakan publik memerlukan pendekatan yang terarah agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Dalam hal ini, strategi memiliki peran penting sebagai sarana untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional. Menurut David (2019) strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Pandangan ini juga didukung oleh Mintzberg (1987) yang menyatakan bahwa strategi tidak hanya dipahami sebagai rencana, tetapi juga sebagai pola tindakan yang konsisten dalam organisasi.

Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa strategi berada pada tataran perencanaan yang menentukan arah dan pendekatan dalam mencapai tujuan kebijakan, sedangkan pelaksanaan strategi diwujudkan melalui berbagai program atau kegiatan sebagai instrumen implementasi. Dengan demikian, program bukan merupakan strategi itu sendiri, melainkan alat yang digunakan untuk menjalankan strategi yang telah dirumuskan. Dalam konteks ini, terdapat hubungan yang saling berkaitan antara kebijakan, strategi, dan program, di mana kebijakan menjadi dasar arah, strategi menjadi cara untuk mencapai tujuan, dan program menjadi bentuk pelaksanaan di lapangan.

Keterkaitan antara kebijakan, strategi, dan program menjadi sangat penting, khususnya pada tahap implementasi dan evaluasi kebijakan. Strategi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjalankan kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang terarah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kebijakan publik menjadi landasan penting dalam mengkaji manajemen strategis, karena strategi pada dasarnya merupakan bagian integral dari proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik.

## 2.3 Manajemen Strategis

Berdasarkan pembahasan mengenai kebijakan publik pada subbab sebelumnya, dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan yang dirumuskan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif melalui strategi yang tepat. Dalam hal ini, strategi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan melalui berbagai program dan kegiatan. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana strategi dirumuskan dalam organisasi publik, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif melalui konsep manajemen strategis.

### 2.3.1 Pengertian Manajemen Strategis

Manajemen strategis memiliki beragam penafsiran yang diberikan oleh para ahli sesuai dengan sudut pandang dan penekanan masing-masing. Wheelen dan Hunger (2012) mendefinisikannya sebagai rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Definisi ini menekankan peran penting pelaku manajerial dalam merancang dan mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap keberhasilan organisasi di masa depan. Fokus pandangan ini berada pada bagaimana pimpinan dan manajer mengelola sumber daya serta mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui langkah-langkah strategis yang terukur.

Kemudian, Certo dan Peter (1998) memandang manajemen strategis sebagai suatu proses berkelanjutan dan berulang yang memastikan organisasi tetap selaras dengan lingkungannya. Penekanan utama definisi ini berada pada sifat manajemen strategis yang dinamis, di mana strategi tidak hanya dirumuskan sekali, melainkan terus diperbarui sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Hal ini menggambarkan bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi secara konsisten melalui pembaruan strategi yang relevan dan responsif.

Pandangan yang serupa terkait kesinambungan proses dikemukakan oleh David (2006) yang mendefinisikan manajemen strategis sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. David menekankan bahwa ketiga tahap tersebut membentuk suatu siklus berkesinambungan, di mana hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan strategi di masa mendatang. Pandangan ini memperlihatkan bahwa manajemen strategis tidak hanya sebatas perumusan atau implementasi, tetapi juga mengintegrasikan evaluasi sebagai bagian integral dari proses strategis.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa Wheelen dan Hunger menitikberatkan definisi pada peran manajerial sebagai pengambil keputusan strategis, sementara Certo dan Peter menyoroti sifat berulang dari proses manajemen strategis yang berorientasi pada keselarasan dengan lingkungan. David memiliki kesamaan dengan Certo dan Peter dalam menekankan kesinambungan proses, namun memberikan penekanan lebih pada tiga tahapan utama yang saling terhubung membentuk sebuah siklus. Dari keseluruhan pandangan tersebut, manajemen strategis dapat disimpulkan sebagai suatu proses terpadu yang melibatkan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi oleh pihak manajerial secara berkesinambungan, dengan tujuan memastikan organisasi mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika lingkungan yang terus berubah.

### **2.3.2 Manajemen Strategis dalam Sektor Publik**

Manajemen strategis pada dasarnya berlaku secara umum bagi berbagai jenis organisasi, dalam sektor publik penerapannya memiliki karakteristik tersendiri. Kompleksitas sektor publik muncul karena melibatkan beragam pemangku kepentingan yang harus diperhitungkan dalam setiap proses perumusan strategi (Watunglawar, 2021). Oleh karena itu, strategi di sektor publik dituntut lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal, seperti dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, serta regulasi yang berlaku. Untuk mewujudkan manajemen strategis yang efektif, terdapat

beberapa langkah penting yang dapat diterapkan di sektor publik menurut Watunglawar (2021), antara lain:

1. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan strategi.
2. Merumuskan visi dan misi yang jelas serta dapat dikomunikasikan secara efektif kepada semua pihak terkait.
3. Menetapkan tujuan yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu.
4. Menyusun rencana strategis yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek organisasi.
5. Melaksanakan strategi secara konsisten disertai dengan evaluasi berkala untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika lingkungan strategis.

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2022) menemukan bahwa penerapan manajemen strategis di organisasi publik Indonesia terbukti memberikan dampak positif bagi organisasi. Hal tersebut dapat tercapai apabila strategi yang dijalankan disusun secara matang, dilaksanakan dengan tepat, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen strategis pada sektor publik menurut Mukhlis (2022) yaitu:

1. Melakukan perencanaan strategi yang matang.
2. Mengimplementasikan strategi secara tepat dan konsisten.
3. Melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan strategi.
4. Mengintegrasikan penggunaan teknologi untuk mendukung efektivitas strategi.
5. Mengutamakan pendekatan partisipatif dalam proses manajerial.
6. Menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan yang dinamis.

Berdasarkan dua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis dalam sektor publik bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan sebuah pendekatan menyeluruh yang menuntut adaptasi terhadap perubahan serta partisipasi dari berbagai pihak. Mukhlis (2022) menekankan

pentingnya penggunaan teknologi dan partisipasi stakeholder, sedangkan Watunglawar (2021) memberikan langkah-langkah operasional yang lebih sistematis mulai dari perumusan visi hingga evaluasi kebijakan. Dengan demikian, penerapan manajemen strategis yang efektif pada organisasi publik memerlukan kombinasi antara fleksibilitas adaptif dan perencanaan terstruktur.

### **2.3.3 Tahapan Manajemen Strategis**

Menurut (Kurnianingsih, 2023) dalam bukunya menjelaskan bahwa strategi merupakan hasil dari proses manajemen strategis yang disusun secara sistematis dan bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen strategis tidak hanya sekadar perencanaan, melainkan mencakup serangkaian proses terpadu yang mengarahkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan serta memaksimalkan potensi internal yang dimiliki. Menurut Wheelen dan Hunger (2012) tahapan manajemen strategis mencakup beberapa langkah untuk menghasilkan strategi. Tahapan tersebut terdiri dari:

1. **Pemindaian lingkungan.** Tahap ini adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan memantau informasi dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal untuk menemukan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan organisasi. Lingkungan internal meliputi faktor makro seperti ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial budaya, dan fisik. Lingkungan internal mencakup struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya yang dimiliki. Hasil pemindaian ini menjadi dasar untuk membuat analisis SWOT.
2. **Formulasi strategi.** Tahap ini menyusun rencana strategis jangka panjang berdasarkan hasil pemindaian, yang mencakup pernyataan misi, penetapan tujuan yang spesifik dan terukur, serta pemilihan strategi ditingkat korporat, bisnis, dan fungsional. Strategi yang dipilih bertujuan memanfaatkan peluang, mengatasi ancaman, dan memaksimalkan kekuatan sambil meminimalkan kelemahan. Tahap ini juga menetapkan kebijakan sebagai pedoman pengambilan keputusan.

3. Implementasi Strategi. Tahap ini menerjemahkan strategi yang telah dirumuskan menjadi aksi nyata melalui penyusunan program, anggaran, dan prosedur kerja (SOP). Implementasi seringkali memerlukan perubahan struktur organisasi, sistem kerja, atau budaya perusahaan agar strategi dapat berjalan efektif. Fokus utamanya adalah memastikan sumber daya dialokasikan dengan tepat, pekerjaan dijalankan sesuai rencana, dan koordinasi antar bagian berjalan lancar. Pada tahap ini, teknik manajemen proyek dan manajemen perubahan sering digunakan untuk memastikan strategi terwujud sesuai target waktu dan biaya.
4. Evaluasi dan Kontrol. Tahap ini menjadi proses penting dalam manajemen strategis yang berfungsi untuk menilai sejauh mana strategi yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual organisasi dengan standar atau hasil yang diharapkan, selain itu juga pada tahap ini dilakukan kontrol agar evaluasi melihat aspek hasil (*output control*), perilaku (*behavior control*), dan input (*input control*). Dengan demikian, tahap ini memastikan strategi berjalan sesuai rencana, dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan agar organisasi mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan.

Dalam hal ini David (2006) juga mengemukakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan ketika suatu organisasi akan membuat strategi, tahapan tersebut yaitu:

1. Formulasi Strategi. Tahap ini mencakup pengembangan visi dan misi organisasi, identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, serta penilaian kekuatan dan kelemahan internal. Dari proses ini, organisasi menetapkan tujuan jangka panjang dan merancang sejumlah alternatif strategi. Strategi yang dipilih nantinya menjadi dasar arah kebijakan organisasi, termasuk keputusan tentang diversifikasi, kolaborasi, hingga penghindaran risiko kegagalan.
2. Implementasi Strategi. tahap ini merupakan proses penerapan strategi yang telah dirumuskan ke dalam aktivitas nyata organisasi. situasi ini

menuntut keterlibatan manajemen dalam menyusun kebijakan, menggerakkan sumber daya manusia, membentuk struktur organisasi yang mendukung strategi, serta mengembangkan budaya organisasi yang kondusif.

3. Evaluasi Strategi. Ini merupakan tahap akhir dalam siklus manajemen strategis. Tujuan utamanya adalah menilai efektivitas strategi yang dijalankan, serta melakukan koreksi jika diperlukan. Evaluasi melibatkan tiga aktivitas pokok yaitu menelaah kembali faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja organisasi, dan mengambil tindakan perbaikan strategis. Evaluasi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kemunduran, bahkan kegagalan organisasi.

Berdasarkan uraian tahapan di atas, penelitian ini mengadopsi kerangka manajemen strategis dari David (2006) yang dipilih sebagai landasan utama karena menawarkan struktur konseptual yang jelas serta operasional dalam perumusan strategi. Dalam kerangka tersebut, tahapan formulasi memegang peranan sentral, sebab di sinilah organisasi menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menilai kekuatan serta kelemahan internal, hingga merancang berbagai alternatif strategi yang dapat ditelaah secara kritis. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada re-formulasi strategi sebagai tindakan optimalisasi.

Re-formulasi strategi dipilih karena memiliki peran penting dalam mengkaji ulang arah dan efektivitas strategi yang telah diterapkan. Melalui tahap ini, strategi yang ada dianalisis kembali untuk menilai kesesuaiannya dengan dinamika lingkungan eksternal serta kapabilitas internal organisasi. Proses pengkajian ulang yang komprehensif memungkinkan peneliti menilai relevansi tujuan jangka panjang, mengidentifikasi bagian strategi yang perlu disesuaikan, serta menyusun alternatif strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi.

## 2.4 Formulasi Strategi

### 2.4.1. Pengertian Formulasi Strategi

Formulasi strategi dipandang oleh Certo dan Peter (1998) sebagai proses penentuan arah tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini mencakup analisis, perencanaan, dan pemilihan strategi yang dinilai memiliki peluang terbesar dalam meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran. Fokus utama pandangannya terletak pada pentingnya kejelasan arah tindakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Wheelen dan Hunger (2012) memaknai formulasi strategi sebagai perencanaan strategis jangka panjang yang dipadukan dengan pengembangan strategi, tujuan, dan kebijakan organisasi. Mereka menekankan peran analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga strategi yang dihasilkan mampu memberikan solusi komprehensif terhadap permasalahan eksternal.

Sementara itu, David (2006) menegaskan bahwa formulasi strategi tidak cukup hanya mengandalkan intuisi, melainkan harus didukung oleh alat analisis yang objektif dan terstruktur. Menurutnya, penggunaan metode analisis yang terukur akan membantu menghasilkan strategi yang lebih tepat sasaran, realistis, dan efektif dalam menjawab tantangan yang dihadapi organisasi. Pendekatan ini memperkuat pentingnya landasan analitis yang kuat dalam proses perumusan strategi, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, dapat dilihat bahwa Certo dan Peter menitikberatkan pada kejelasan arah tindakan, Hunger dan Wheelen berfokus pada perencanaan strategis yang diawali dengan analisis lingkungan, sedangkan David mengedepankan penggunaan metode analisis yang objektif dan terstruktur.

Dari pandangan para ahli tersebut, formulasi strategi dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan menentukan arah dan langkah strategis

organisasi melalui analisis lingkungan, penetapan tujuan, serta pemilihan strategi yang paling sesuai. Proses ini mengintegrasikan pemikiran kreatif dengan pendekatan analisis yang terukur, sehingga strategi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan lingkungan dan mengoptimalkan peluang untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

#### **2.4.2. Re-Formulasi Strategi**

David (2006) dalam bukunya menekankan bahwa strategi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan tidak bersifat statis. Seiring dengan dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal, strategi organisasi dapat menjadi usang atau tidak lagi relevan. Reformulasi strategi merupakan proses evaluatif yang bertujuan untuk menyempurnakan kembali arah kebijakan, program, dan kegiatan organisasi agar tetap selaras dengan dinamika lingkungan strategis yang terus berubah. Proses ini tidak hanya dilakukan sebagai respons atas ketidaksesuaian antara perencanaan dan pencapaian, tetapi juga sebagai upaya proaktif untuk menjaga efektivitas dan relevansi strategi dalam mencapai tujuan institusional.

Reformulasi strategi dalam pelaksanaannya memerlukan analisis yang komprehensif terhadap berbagai faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga keputusan strategis yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan tantangan aktual yang dihadapi oleh organisasi sektor publik. Re-formulasi strategi dilakukan apabila:

1. Terjadi perubahan signifikan pada faktor internal maupun eksternal, seperti perubahan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dinamika sosial-politik, perubahan kebutuhan masyarakat, atau keterbatasan sumber daya.
2. Ditemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara hasil aktual dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga strategi yang diterapkan tidak lagi mampu menjawab target kinerja secara optimal.

3. Organisasi mengalami kegagalan atau penurunan kinerja, yang mengindikasikan bahwa strategi sebelumnya tidak lagi relevan, tidak efektif, atau tidak sesuai dengan lingkungan strategis yang ada.

Sebagai bagian dari siklus manajemen strategis yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, re-formulasi strategi akan membawa organisasi kembali melihat lingkungan internal dan eksternal, untuk menyesuaikan strategi agar lebih lebih kontekstual dan adaptif. Dengan demikian, re-formulasi strategi berperan penting dalam memastikan bahwa organisasi sektor publik tetap mampu menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat maupun tantangan lingkungan.

#### **2.4.3. Tahapan Formulasi Strategi**

Formulasi strategi tidak hanya sekadar menyusun pilihan-pilihan strategi, tetapi juga melibatkan proses pemilihan strategi terbaik yang sesuai dengan kondisi organisasi dan lingkungannya. Oleh karena itu, tahap ini menjadi penentu arah kebijakan organisasi ke depan, sebelum nantinya dilanjutkan pada tahap implementasi dan evaluasi strategi. David (2006) menjelaskan tahapan formulasi strategi mencakup hal-hal berikut:

1. Mengembangkan Visi dan Pernyataan Misi

Perumusan visi merupakan bagian penting dalam perencanaan strategis yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum merumuskan misi organisasi. Visi yang baik tidak hanya menggambarkan arah dan cita-cita jangka panjang, tetapi juga harus mempertimbangkan lingkungan kebijakan kelembagaan yang melingkupinya. Pertimbangan ini mencakup aspek fisik, seperti letak geografis, jumlah penduduk, dan luas wilayah, serta aspek nonfisik, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan.

Misi selanjutnya berfungsi sebagai penjabaran operasional dari visi, yang berisi unsur-unsur penunjang seperti produk dan layanan publik yang diberikan, aktivitas strategis yang dijalankan, serta kontribusi organisasi

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan misi yang baik idealnya tidak bersifat terlalu sempit sehingga membatasi ruang gerak organisasi, tetapi juga tidak terlalu luas agar tetap fokus pada tujuan utama. Dalam konteks organisasi publik, misi juga sebaiknya memperhatikan sejumlah komponen utama, antara lain: penerima layanan atau masyarakat sebagai pelanggan utama, jenis produk dan layanan yang ditawarkan, cakupan wilayah atau pasar publik, pemanfaatan teknologi, kepedulian terhadap keberlanjutan pelayanan, filosofi dasar dan nilai yang dianut, konsep diri organisasi, kepedulian terhadap citra dan kepercayaan publik, serta kepedulian terhadap kesejahteraan aparatur atau karyawan. Dengan demikian, misi tidak hanya mencerminkan identitas organisasi, tetapi juga mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak serta memberikan kejelasan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

## 2. Penilaian Lingkungan Eksternal

Penilaian lingkungan eksternal merupakan salah satu tahap penting dalam proses manajemen strategis. Penilaian eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi. Dengan memahami kondisi eksternal, organisasi dapat merumuskan langkah strategis yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan yang terus berubah.

Lingkungan eksternal dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yakni sosial ekonomi, demografis dan lingkungan, politik pemerintah dan hukum, teknologi, serta lingkungan pelayanan publik. Faktor-faktor eksternal ini tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh organisasi, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan atau kegagalan strategi yang diterapkan. Perubahan dalam salah satu aspek eksternal ini akan berdampak langsung terhadap posisi kompetitif organisasi di pasar.

Proses audit eksternal menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, baik manajer maupun staf, agar data yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif. Informasi yang dihimpun dapat berasal dari berbagai

sumber, seperti publikasi pemerintah, laporan perdagangan, hasil riset pasar, hingga berita media massa. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi tren, peluang, maupun ancaman yang berpotensi memengaruhi organisasi, sehingga strategi yang dirumuskan lebih tepat sasaran.

Salah satu alat yang digunakan dalam penilaian lingkungan eksternal adalah *External Strategic Factor Analysis Summary* (EFAS). Matriks ini membantu organisasi dalam memberikan bobot pada setiap faktor eksternal, baik peluang maupun ancaman, sesuai tingkat kepentingannya. Setiap faktor diberi peringkat berdasarkan seberapa efektif strategi organisasi dalam merespons faktor tersebut. Skor total yang diperoleh dari matriks ini memberikan gambaran tentang kemampuan organisasi dalam memanfaatkan peluang eksternal sekaligus meminimalkan dampak dari ancaman. Berikut tabel EFAS yang akan digunakan:

**Tabel 3. *External Factor Analysis Summary* (EFAS)**

<b>Faktor Eksternal</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Skor</b>
<i>Opportunity</i>			
1.			
2.			
Total			
<i>Threats</i>			
1.			
2.			
Total			

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025*

Berdasarkan tabel 3 *External Factor Analysis Summary* (EFAS), penyusunannya dilakukan dengan tahapan yang sistematis sebagaimana dijelaskan oleh David (2019). Langkah pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor strategis eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman berdasarkan hasil observasi, wawancara, maupun studi literatur yang relevan. Faktor-faktor tersebut kemudian diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya, masing-masing faktor diberi bobot dengan skala 0,0 sampai 1,0. Kemudian, setiap faktor diberi rating antara 1 sampai 4,

di mana skor 1 menunjukkan respons yang buruk terhadap ancaman dan skor 4 menunjukkan respons yang sangat baik dalam memanfaatkan peluang.

Bobot yang telah ditentukan kemudian dikalikan dengan rating untuk memperoleh skor terbobot, dan hasil akhirnya dijumlahkan guna mendapatkan nilai total EFAS. Melalui proses tersebut, nilai total yang diperoleh mencerminkan sejauh mana organisasi mampu merespons dinamika eksternal secara efektif. Jika nilai EFAS mendekati angka 4, maka organisasi dianggap memiliki strategi yang baik dalam menghadapi lingkungan eksternal. Sebaliknya, apabila nilai mendekati angka 1, berarti organisasi kurang mampu mengantisipasi ancaman maupun memanfaatkan peluang. Dengan demikian, matriks EFAS berfungsi sebagai instrumen penting dalam formulasi strategi, karena memungkinkan organisasi untuk menilai secara objektif posisi eksternalnya sekaligus menjadi dasar perumusan langkah strategis berikutnya.

### 3. Penilaian Lingkungan Internal

Penilaian lingkungan internal merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Proses ini dilakukan melalui pengumpulan informasi dari berbagai bidang fungsional organisasi, meliputi pemasaran, keuangan, produksi atau operasional, sumber daya manusia, serta sistem informasi. Dari hasil pengumpulan informasi tersebut, faktor-faktor penting seperti kualitas sumber daya manusia, teknologi yang digunakan, efisiensi operasional, reputasi institusi, dan kondisi keuangan dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif. Selain itu, penilaian ini menekankan pentingnya keterlibatan manajer dan karyawan lintas bidang agar perspektif yang diperoleh lebih objektif dan representatif. Penilaian lingkungan internal dilakukan dengan menggunakan IFAS seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4. Internal Factor Analysis Summary (IFAS)**

<b>Faktor Internal</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Skor</b>
<i>Strenght</i>			
1.			
2.			
Total			
<i>Weakness</i>			
1.			
2.			
Total			

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025*

Berdasarkan tabel 4 *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS), penyusunannya dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, setiap faktor strategis internal yang telah diidentifikasi dimasukkan ke dalam tabel, baik berupa kekuatan maupun kelemahan. Kedua, masing-masing faktor diberi bobot dengan skala 0,0 sampai 1,0 sesuai tingkat kepentingannya, dan total seluruh bobot harus berjumlah 1,0. Ketiga, setiap faktor diberikan rating antara 1 sampai 4, di mana skor 1 menunjukkan kelemahan besar, skor 2 kelemahan cukup besar, skor 3 kekuatan cukup besar, dan skor 4 kekuatan sangat besar. Keempat, bobot dikalikan dengan rating untuk mendapatkan skor terbobot bagi masing-masing faktor. Langkah terakhir adalah menjumlahkan seluruh skor terbobot untuk memperoleh skor total IFAS.

Nilai total IFAS menggambarkan seberapa kuat posisi internal organisasi. Skor rata-rata adalah 2,5, apabila skor total mendekati 4,0 berarti organisasi berada pada posisi internal yang sangat kuat, sedangkan skor mendekati 1,0 menunjukkan kondisi internal yang lemah. Dengan demikian, matriks IFAS memberikan dasar kuantitatif yang dapat digunakan manajemen dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing organisasi.

#### 4. Menetapkan Tujuan Jangka Panjang

Tujuan merupakan hasil spesifik yang harus dicapai organisasi dalam upaya mewujudkan misi dasarnya. Menurut David, tujuan yang baik

harus memiliki beberapa kriteria, antara lain menantang namun tetap realistis, dapat diukur sehingga pencapaiannya bisa dievaluasi, konsisten dengan visi dan misi organisasi, beralasan serta relevan dengan kebutuhan strategis, dan dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Selain itu, tujuan yang baik harus mampu dipahami oleh seluruh pelaksana strategi sehingga dapat menjadi pedoman bersama dalam bertindak. Dengan demikian, tujuan strategis tidak hanya menjadi sasaran formal, tetapi juga instrumen penting untuk mengarahkan sumber daya dan upaya organisasi secara efektif menuju keberhasilan yang berkelanjutan.

#### 5. Analisis dan Pilihan Strategi

Pada tahap ini, organisasi akan menghubungkan antara faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dengan kondisi internal yang mencakup kekuatan serta kelemahan yang dimilikinya. Proses ini bertujuan untuk merumuskan empat jenis strategi alternatif yang dapat diterapkan sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Faktor Internal/ Eksternal	<i>STRENGTH (S)</i>	<i>WEAKNESSES (W)</i>
		1. .... 2. ....
<i>OPPORTUNITIES (O)</i> 1. .... 2. ....	<b>Strategi S-O</b> (Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang)	<b>Strategi W-O</b> (Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang)
<i>THREATS (T)</i> 1. .... 2. ....	<b>Strategi S-T</b> (Memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman)	<b>Strategi W-T</b> (Meminimalkan kelemahan sambil menghindari ancaman)

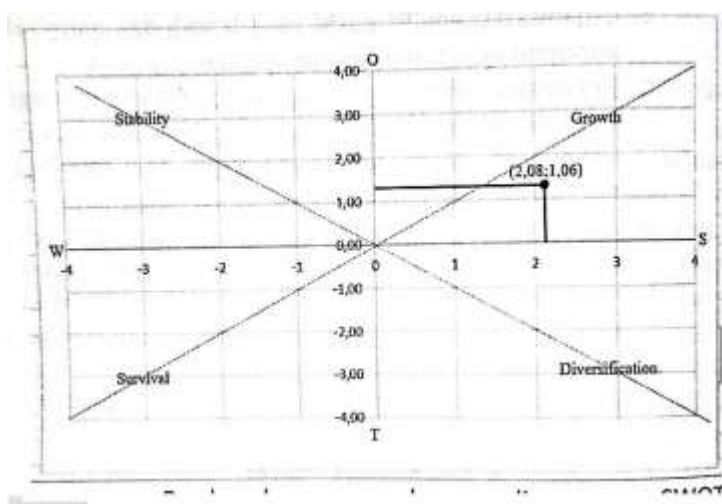
**Gambar 1. Matriks TOWS**

Sumber: Buku "Strategic Management concepts and cases tent edition" Fred r. David, 2006

Gambar 1. Matriks TOWS membantu mengidentifikasi empat jenis strategi yang dapat diambil oleh organisasi. Strategi S-O disusun dengan memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, strategi W-O berfokus pada mengatasi kelemahan agar peluang tetap bisa dimanfaatkan, strategi S-T menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, dan strategi W-T bertujuan meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman.

Dengan pendekatan ini, organisasi dapat menentukan arah kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Setelah membuat alternatif-alternatif strategi, langkah selanjutnya yaitu menghitung skor-skor yang didapatkan pada saat membuat matriks EFAS dan matriks IFAS sebagai dasar dalam pemetaan posisi organisasi ke dalam koordinat diagram SWOT, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



**Gambar 2. Diagram SWOT**

Sumber: Buku "Analisis SWOT" Rangkuti dkk, 2021

Gambar 2. Diagram SWOT menunjukkan pemetaan strategi dalam empat kuadran berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal. Sumbu X menunjukkan analisis internal, diperoleh dari selisih total skor kekuatan (S) dan kelemahan (W). Sumbu Y menunjukkan analisis eksternal, dihitung dari selisih total skor peluang (O) dan ancaman (T). Posisi koordinat yang diperoleh dari analisis ini akan menentukan jenis strategi yang paling tepat untuk diterapkan oleh organisasi. Adapun jenis strategi pada tiap kuadran yaitu sebagai berikut:

1. Kuadran I mendukung strategi *growth* atau progresif (Strategi S-O), menunjukkan bahwa organisasi dalam posisi yang prima dan memiliki banyak peluang.

2. Kuadran II mendukung strategi *diversification* atau diversifikasi (Strategi S-T), yang menunjukkan bahwa organisasi cukup kuat tetapi memiliki tantangan yang besar.
3. Kuadran III mendukung strategi *stability* atau perbaikan (Strategi W-O), yang menunjukkan bahwa organisasi memiliki peluang yang dapat menutupi kelemahannya.
4. Kuadran IV mendukung strategi *survival* atau defensif (Strategi W-T). yang menunjukkan posisi organisasi lemah dan memiliki ancaman besar.

Sementara itu, Whelen dan Hunger (2012) menjabarkan tahapan formulasi strategi sebagai berikut:

1. Misi

Misi organisasi menggambarkan tujuan yang menetapkan ruang lingkup usaha serta nilai-nilai kunci yang dijunjung oleh organisasi. Sebuah misi yang baik bersifat unik dan inspiratif, serta memberi arah strategis jangka panjang.

2. Tujuan

Setelah misi ditetapkan, perusahaan menetapkan tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan sebaiknya dirumuskan dengan kata kerja tindakan yang jelas, menyatakan hal yang ingin dicapai dan target waktu tercapainya, serta tujuan juga memiliki karakteristik SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).

3. Strategi

Strategi merupakan usaha yang akan dilakukan organisasi untuk mewujudkan misi dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meyelaraskan kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk meraih keunggulan kompetitif. Wheelen dan Hunger membagi strategi dalam beberapa tingkatan diantaranya terdapat strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional.

4. Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai pedoman umum yang mengarahkan proses pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Kebijakan memastikan

bahwa setiap keputusan operasional konsisten dengan misi, tujuan, dan strategi organisasi. Dengan adanya kebijakan yang jelas, seluruh pengambilan keputusan organisasi diberi pedoman umum yang memudahkan untuk bertindak sesuai rencana strategis.

Adapun Certo dan Peter (1998) mengemukakan bahwa formulasi strategi melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Analisis Lingkungan

Pada tahap ini, organisasi menelaah faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi jalannya organisasi. Analisis eksternal mencakup identifikasi peluang dan ancaman. Sementara itu, analisis internal fokus pada kekuatan dan kelemahan organisasi seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya kerja, hingga kondisi keuangan. Hasil dari tahap ini dituangkan dalam analisis SWOT sebagai kerangka yang menghubungkan faktor internal dan eksternal organisasi.

2. Penetapan Tujuan Organisasi

Setelah memahami lingkungan, organisasi menetapkan tujuan jangka panjang yang sejalan dengan visi dan misi. Tujuan ini harus jelas, terukur, realistis, serta dapat dicapai dalam periode tertentu. Alat bantu yang sering dipakai pada tahap ini adalah *Balanced Scorecard* (BSC).

3. Identifikasi Alternatif Strategi

Pada tahap ini organisasi mulai menyusun berbagai alternatif strategi yang mungkin dilakukan. Alternatif strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT yang di input kedalam matriks TOWS.

4. Evaluasi Alternatif Strategi

Semua alternatif strategi yang dihasilkan akan dievaluasi secara sistematis agar organisasi dapat memilih strategi terbaik. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria internal (biaya, sumber daya, kemampuan organisasi), dan kriteria eksternal (daya saing, peluang pasar, tren lingkungan). Pada tahap ini dilakukan menggunakan matriks *Quantitative*

*Strategic Planning Matrix* (QSPM), atau *BCG Matrix* yang dapat membantu menilai daya tarik pasar dan kekuatan organisasi.

#### 5. Pemilihan Strategi Terbaik

Setelah evaluasi, organisasi menentukan strategi yang paling sesuai dengan kondisi internal dan eksternal serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keputusan strategi pada tahap ini menjadi dasar utama bagi implementasi strategi di tahap berikutnya dalam proses manajemen strategis.

Ketiga pakar tersebut memiliki titik temu dalam memandang formulasi strategis sebagai proses sistematis yang dimulai dari perumusan arah organisasi hingga pengambilan keputusan strategi. Ketiganya menekankan pentingnya visi misi, penetapan tujuan yang jelas dan terukur, serta perumusan strategi alternatif sebagai inti dari proses manajemen strategis. Persamaannya juga terlihat pada pemanfaatan analisis internal dan eksternal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian, perbedaan muncul pada penekanan dan sistematika yang digunakan oleh masing-masing pakar. Wheelen dan Hunger (2012) menitikberatkan pada urutan logis yang dimulai dari misi, tujuan, strategi, hingga kebijakan sebagai pedoman tindakan organisasi. Certo dan Peter (1990) lebih menekankan penggunaan berbagai instrumen analisis seperti SWOT, TOWS, QSPM, maupun BCG Matrix dalam tahapan penilaian strategi. Sementara itu, David (2006) mengembangkan kerangka formulasi strategi yang lebih sistematis dan terstruktur melalui tahapan analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, hingga pemilihan strategi yang paling tepat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan formulasi strategi menurut David (2006) sebagai landasan analisis karena dinilai lebih operasional dan aplikatif dalam mengidentifikasi kondisi organisasi secara komprehensif. Meskipun tahapan formulasi strategis David (2006) banyak digunakan dalam konteks organisasi privat, dalam penelitian ini teori tersebut diadaptasi untuk menganalisis strategi pada organisasi publik dengan menyesuaikan karakteristik pelayanan publik. Peneliti tidak menggunakan seluruh indikator

yang terdapat dalam analisis lingkungan internal dan eksternal, melainkan memilih dan menyesuaikan beberapa indikator yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Dengan demikian, penggunaan teori ini tetap mempertahankan substansi konsep, namun disesuaikan secara kontekstual agar lebih relevan dengan objek penelitian.

## 2.5 Identitas Kependudukan Digital

Administrasi kependudukan di Indonesia saat ini hadir dalam dua bentuk utama, yaitu fisik dan digital. Dokumen fisik mencakup KTP-el, Kartu Keluarga, serta akta-akta kependudukan lainnya yang dicetak dan disimpan oleh masyarakat. Kemudian Dokumen digital berbentuk aplikasi diponsel dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, IKD merupakan instrumen berbasis *QR Code* yang memuat informasi identitas penduduk dan dapat disimpan dalam perangkat elektronik seperti ponsel pintar (Permadi, 2023). Inovasi ini hadir sebagai solusi untuk menekan biaya pencetakan dokumen, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Fungsi Identitas Kependudukan Digital tercantum dalam pasal 15 Permendagri No.72 Tahun 2022. Diantaranya yaitu:

1. Alat pembuktian identitas. IKD berperan sebagai sarana untuk membuktikan identitas seseorang melalui proses verifikasi terhadap data identitas yang dimiliki, guna memastikan keabsahan dan kepemilikan data secara sah.
2. Instrumen autentikasi identitas. Fungsi ini dijalankan melalui verifikasi yang lebih mendalam, mencakup penggunaan biometrik, data identitas personal, kode verifikasi, serta *QR code*, guna memastikan bahwa identitas digital benar-benar dimiliki individu bersangkutan.

3. Sarana otorisasi identitas. Pemilik IKD memiliki wewenang untuk memberikan atau membatasi akses terhadap data identitas digitalnya. Artinya, individu tersebut memiliki hak kontrol penuh atas siapa saja yang dapat mengakses dan menggunakan data identitas tersebut.

Setiap warga yang telah melakukan perekaman KTP-el dapat langsung mengunduh aplikasi IKD serta melakukan proses aktivasi dengan pendampingan dari petugas Dukcapil. Kehadiran IKD menjadi alternatif praktis bagi penduduk yang belum menerima fisik KTP-el, karena aplikasi ini telah merepresentasikan dokumen kependudukan secara digital. Selain memuat data KTP-el, aplikasi IKD juga mencakup dokumen penting lainnya seperti Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, akta-akta pencatatan sipil, surat keterangan pindah, dan biodata penduduk, sehingga mampu memberikan kemudahan dalam akses dan penggunaan berbagai dokumen kependudukan secara terpadu.

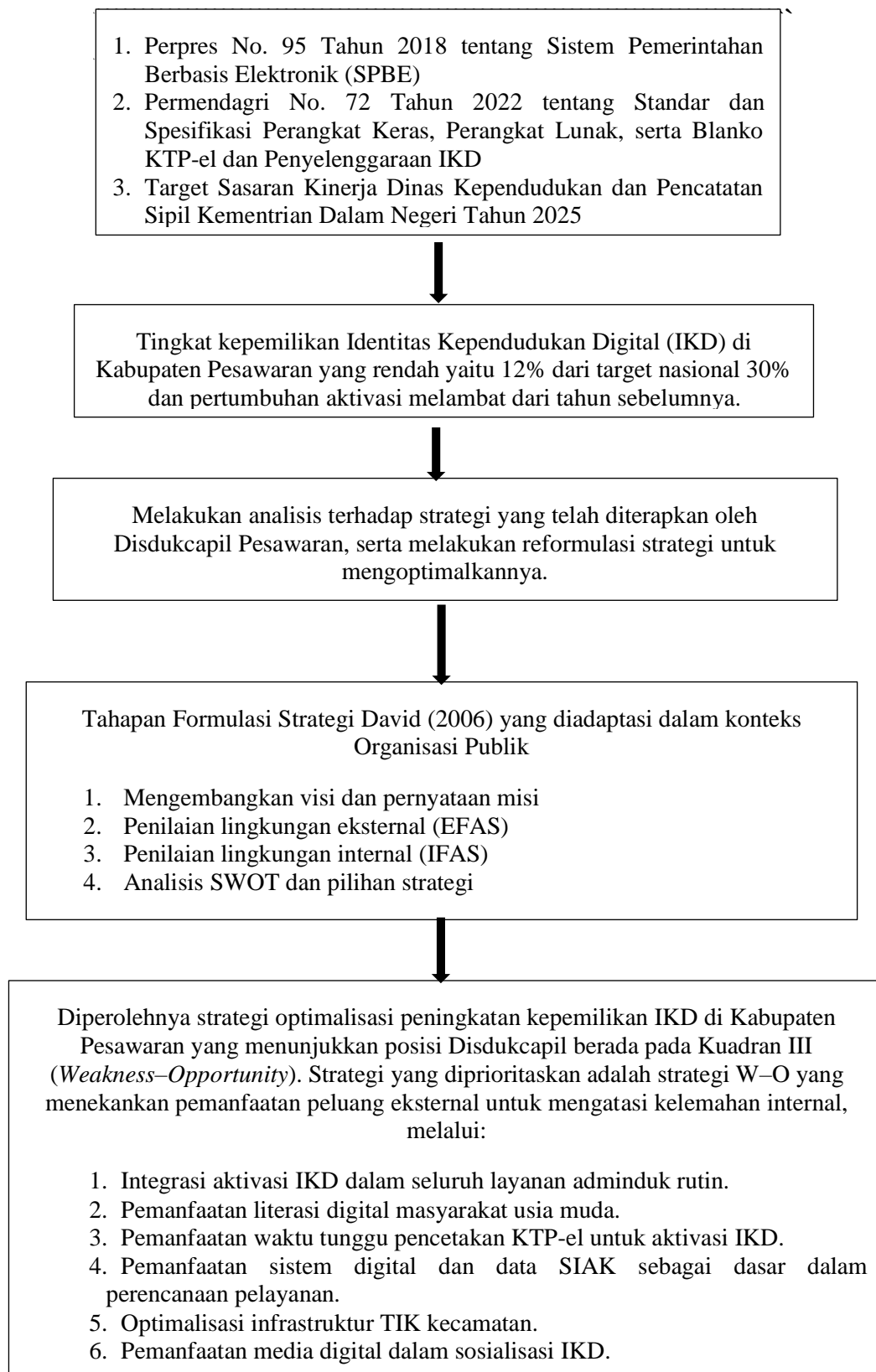
IKD dirancang untuk dikembangkan menjadi bagian dari sistem identitas digital nasional yang disebut *INA-Pass*. Melalui penguatan dan penambahan fitur, IKD akan berfungsi tidak hanya sebagai identitas digital, tetapi juga sebagai Digital ID dan sarana akses tunggal (*single sign-on*) untuk berbagai layanan publik digital yang terintegrasi dalam Portal Nasional (Dukcapil Kemendagri, 2024). Pengembangan sistem ini dilaksanakan oleh Perum Peruri sebagai pengelola *GovTech* Indonesia, bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil, dalam rangka membangun infrastruktur pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, aman, dan efisien (pttati, 2024).

## **2.6 Kerangka Pikir**

Menurut Sugiyono (2022), kerangka berpikir merupakan dasar pola pikir peneliti yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan alur pemikiran dalam memahami objek penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan logis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dengan demikian, kerangka berpikir memegang peran penting dalam merumuskan keterkaitan antara teori, permasalahan, dan arah solusi yang akan ditawarkan.

Dalam upaya mendorong percepatan aktivasi IKD, pemerintah telah mengarahkan seluruh Disdukcapil tiap daerah untuk melaksanakan berbagai strategi pelayanan yang adaptif dan dekat dengan masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Strategi tersebut mencakup layanan di kantor dan jemput bola yang menjangkau langsung warga. Namun, pelaksanaan strategi yang sudah ada masih mencatat rendahnya kepemilikan IKD masyarakat Pesawaran.

Penelitian ini telah menganalisis strategi yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan kepemilikan IKD. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa posisi Disdukcapil berada pada Kuadran III (*Weakness–Opportunity*), sehingga strategi yang diprioritaskan adalah strategi W–O, yaitu memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal. Adapun alur pemikiran penelitian ini disajikan sebagai berikut:



**Gambar 3. Kerangka Pikir**

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti dalam konteks alamiah, dinamis, dan kompleks, serta memungkinkan peneliti menggali makna yang tersembunyi di balik realitas sosial yang tampak di permukaan. Menurut (Sugiyono, 2022), penelitian kualitatif berlandaskan paradigma postpositivistik dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.

Jenis studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu kasus tertentu, yaitu strategi peningkatan kepemilikan IKD pada Disdukcapil Kabupaten Pesawaran sebagai sebuah program organisasi publik. Creswell (2018) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan desain penelitian di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus, yang dapat berupa program, peristiwa, aktivitas, atau proses, dengan mengumpulkan informasi secara rinci melalui berbagai prosedur pengumpulan data. Jenis studi kasus juga dipilih karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membangun teori baru, melainkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi peningkatan kepemilikan IKD yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Pesawaran.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tahapan manajemen strategi David (2006) dengan menitikberatkan pada proses formulasi strategi. Pendekatan formulasi strategi model David dinilai paling sesuai dengan kebutuhan analisis pada Disdukcapil Kabupaten Pesawaran. Pendekatan David dipilih karena menyediakan kerangka

kerja yang sistematis dan aplikatif dimulai dari perumusan visi/misi, audit eksternal dan internal, penetapan tujuan strategis, hingga analisis dan pilihan strategi, sehingga memudahkan integrasi analisis. Kerangka ini relevan dengan kebutuhan penelitian kebijakan publik karena memungkinkan pengelompokan temuan lapangan menjadi faktor strategis, perumusan alternatif strategi yang berbasis bukti, serta pemetaan prioritas strategi yang dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi operasional bagi Disdukcapil Kabupaten Pesawaran.

Fokus penelitian dipusatkan pada tahapan proses formulasi strategi sesuai dengan manajemen strategis David (2006). Uraian mengenai fokus penelitian dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Melihat bagaimana visi, misi, dan tujuan strategis yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Pesawaran telah dirumuskan secara jelas, relevan, dan mendukung upaya peningkatan kepemilikan IKD.
2. Melakukan identifikasi faktor-faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang memengaruhi adopsi IKD. Proses ini dilakukan berdasarkan kategori David diantaranya yaitu ekonomi, sosial-budaya, demografi, lingkungan, teknologi, dan kebijakan. Setiap faktor akan diberi bobot dan rating untuk menyusun tabel EFAS sebagai dasar perumusan strategi yang responsif terhadap dinamika eksternal.
3. Melakukan identifikasi faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang ada pada Disdukcapil Kabupaten Pesawaran. Setiap faktor akan diberi bobot dan rating untuk menyusun tabel IFAS sebagai dasar perumusan strategi yang responsif terhadap dinamika internal.
4. Menyusun alternatif strategi dengan menggabungkan hasil EFAS dan IFAS ke dalam Matriks TOWS untuk menghasilkan alternatif-alternatif strategi yang kontekstual. Selanjutnya melakukan pemetaan posisi organisasi pada koordinat SWOT untuk menentukan kecenderungan strategi utama.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah administratif Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sebagai areal geografis penelitian. Kabupaten Pesawaran dipilih karena merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari kebijakan transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Adapun lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesawaran yang beralamat di Jl. Raya Kedondong, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Instansi ini dipilih karena memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama kebijakan administrasi kependudukan di daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan aktivasi IKD kepada masyarakat.

Pemilihan lokasi penelitian pada Disdukcapil Kabupaten Pesawaran didasarkan pada pertimbangan substantif, yaitu relevansi instansi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan IKD di tingkat daerah. Selain itu, hingga pertengahan tahun 2025, tingkat aktivasi IKD di Kabupaten Pesawaran masih tergolong rendah dan belum mencapai target nasional sebesar 30% dari jumlah penduduk wajib KTP, di mana capaian yang ada masih berada pada kisaran 12%, meskipun berbagai upaya dan strategi telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi, sehingga menjadikan Kabupaten Pesawaran relevan sebagai lokasi kajian untuk menelaah strategi yang telah diterapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya optimalisasi dalam meningkatkan kepemilikan IKD di masyarakat.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti perlu melalui proses sistematis dalam mengumpulkan dan memilah data. Data diposisikan sebagai bahan mentah yang menjadi dasar dalam menghasilkan informasi yang bermakna, oleh karena itu proses pengumpulan data menjadi tahap krusial dalam kegiatan penelitian, khususnya dalam pelaksanaan analisis bersifat deskriptif.

Selama pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan secara langsung di kantor Disdukcapil Kabupaten Pesawaran. Wawancara mendalam dilakukan terhadap tujuh (7) orang informan yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria peneliti. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2026, dengan waktu pelaksanaan yang menyesuaikan ketersediaan informan. Wawancara menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memuat sejumlah pertanyaan utama terkait strategi yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Pesawaran dalam peningkatan kepemilikan IKD, serta informasi mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan strategi tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami strategi peningkatan kepemilikan IKD di Disdukcapil Kabupaten Pesawaran, memiliki posisi atau peran dalam struktur organisasi Disdukcapil, serta telah memiliki masa kerja minimal dua tahun sehingga memahami kondisi dan dinamika lingkungan organisasi. Selain itu, jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan didasarkan pada tingkat kejenuhan data. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (1988) dalam Sugiyono (2022) yang menyatakan bahwa penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila data yang diperoleh telah mencapai titik jenuh, yaitu ketika informasi yang diberikan oleh informan tidak lagi menghasilkan data baru yang signifikan.

Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan telepon genggam sebagai alat perekam suara guna menjaga keakuratan informasi yang diperoleh serta mempermudah proses transkripsi data. Setiap sesi

wawancara berlangsung selama kurang lebih 30 hingga 60 menit, bergantung pada kedalaman informasi yang disampaikan oleh informan. Dalam pelaksanaannya, wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan staf bidang pendaftaran penduduk dilakukan pada jam kerja, sedangkan wawancara dengan Sekretaris Dinas serta informan yang terlibat dalam pemberian penilaian (rating) dan pembobotan pada analisis SWOT dilakukan pada saat waktu istirahat kerja.

Selain itu, peneliti juga melibatkan empat (4) informan tambahan yang berperan dalam pemberian pembobotan dan penilaian (rating) pada analisis SWOT. Di samping wawancara tatap muka, peneliti juga mengumpulkan data dari sepuluh (10) informan tambahan melalui instrumen pertanyaan tertulis secara daring menggunakan *Google Form*. Instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh informasi pendukung terkait pelaksanaan strategi serta pandangan informan mengenai program aktivasi IKD.

Dalam pelaksanaannya, peneliti menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan waktu informan yang disebabkan oleh kesibukan pegawai dalam menjalankan pelayanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, proses wawancara sering kali harus menyesuaikan dengan jadwal serta waktu luang yang dimiliki oleh informan.

Untuk data informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Data Informan dalam Penelitian**

No	Jabatan	Tanggal	Data yang didapat
1.	Sekretaris Dinas	4 Desember 2025	Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini mencakup visi, misi, dan tujuan Disdukcapil Kabupaten Pesawaran dalam implementasi IKD, serta strategi yang telah dan sedang dijalankan. Selain itu, peneliti juga menggali informasi mengenai kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Selain itu, peneliti

No	Jabatan	Tanggal	Data yang didapat
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9 November dan 4 Desember 2025	<p>selanjutnya meminta penilaian berupa pemberian bobot dan rating pada setiap faktor internal dan eksternal sebagai dasar analisis strategis.</p> <p>Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini mencakup visi, misi, dan tujuan Disdukcapil Kabupaten Pesawaran dalam implementasi IKD, serta strategi yang telah dan sedang dijalankan. Selain itu, peneliti juga menggali informasi mengenai kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Selain itu, peneliti selanjutnya meminta penilaian berupa pemberian bobot dan rating pada setiap faktor internal dan eksternal sebagai dasar analisis strategis.</p>
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	4 Desember 2025	<p>berupa pemberian bobot dan rating pada setiap faktor internal dan eksternal sebagai dasar analisis strategis.</p>
4.	Administrator Database Kependudukan	4 Desember 2025	<p>Penilaian berupa pemberian bobot dan rating pada setiap faktor internal dan eksternal sebagai dasar analisis strategis.</p>
5.	Administrator Database Bidang PIAK	4 Desember 2025	<p>Penilaian berupa pemberian bobot dan rating pada setiap faktor internal dan eksternal sebagai dasar analisis strategis.</p>
6.	Staf Kependudukan	4 Desember 2025	<p>Informasi kondisi internal organisasi seperti efektivitas strategi jemput bola, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, fasilitas penunjang, serta perbandingan layanan IKD dengan KTP-el konvensional. Selain itu, berupa pemberian bobot dan rating pada setiap faktor internal dan eksternal sebagai</p>

No	Jabatan	Tanggal	Data yang didapat
			dasar analisis strategis.
7.	Masyarakat yang sudah memiliki IKD	7 November 2025	Informasi mencakup pengalaman langsung dalam proses aktivasi dan penggunaan IKD, kemudahan atau kendala teknis yang dirasakan, tingkat pemahaman terhadap manfaat IKD, serta pandangan mereka terhadap pelayanan.
8.	Masyarakat yang belum memiliki IKD.	4 Desember 2025	Informasi alasan belum melakukan aktivasi, dan harapan mereka terhadap peningkatan pelayanan dan strategi penyebaran informasi tentang IKD.

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025*

## 2. Observasi

Dalam penelitian ini, teknik observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai kondisi riil di lapangan terkait perumusan strategi peningkatan kepemilikan IKD oleh Disdukcapil Kabupaten Pesawaran. Pada tahap awal penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi dalam bentuk pra-riset yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian, memperjelas fokus kajian, serta membantu peneliti dalam menentukan informan yang relevan dan teknik pengumpulan data yang tepat. Hasil dari kegiatan pra-riset tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi peneliti untuk melaksanakan observasi lapangan sebagai bagian dari penelitian utama yang dilakukan secara lebih terencana dan sistematis.

Observasi lapangan dalam penelitian ini difokuskan pada kegiatan pelayanan serta pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Melalui kegiatan observasi ini, peneliti mengamati berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan IKD, termasuk kondisi fisik ruang kerja yang berhubungan dengan pelayanan administrasi kependudukan, sarana dan

prasarana pendukung, serta interaksi antara petugas Disdukcapil dan masyarakat sebagai sasaran program kepemilikan IKD. Dalam pelaksanaannya, peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap kegiatan observasi dalam bentuk foto sebagai data pendukung.

Data yang diperoleh melalui observasi lapangan digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi temuan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para informan. Dengan demikian, observasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai upaya triangulasi data yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian, khususnya dalam menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pesawaran serta dalam optimalisasi strategi untuk meningkatkan kepemilikan IKD di masyarakat.

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara, serta sebagai bukti pendukung terhadap implementasi strategi peningkatan kepemilikan IKD di Kabupaten Pesawaran. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai dokumen resmi baik yang bersifat regulatif dan dokumen internal instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Dokumen regulatif digunakan untuk memahami dasar kebijakan dan kerangka penyelenggaraan IKD secara nasional, sedangkan dokumen internal instansi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi empiris pelaksanaan program serta strategi yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pesawaran.

Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti memperoleh data terkait arah kebijakan organisasi, capaian program, serta kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivasi IKD di Kabupaten Pesawaran. Data dokumentasi tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung hasil analisis penelitian serta memvalidasi informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

**Tabel 6. Dokumentasi**

No	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Peraturan Kemetrian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022.	Dokumen regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Indonesia
2.	Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029.	Dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi Disdukcapil dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, termasuk IKD.
3.	Laporan perjalanan dinas PAK TUAH tahun 2025	Dokumen internal yang memuat data capaian pelaksanaan PAK TUAH atau jempit bola.
4.	Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2025	Dokumen resmi dari BPS yang memuat data dan informasi statistik terkait kondisi geografis, pemerintahan, serta perkembangan sosial, demografi, dan perekonomian di Kabupaten Pesawaran

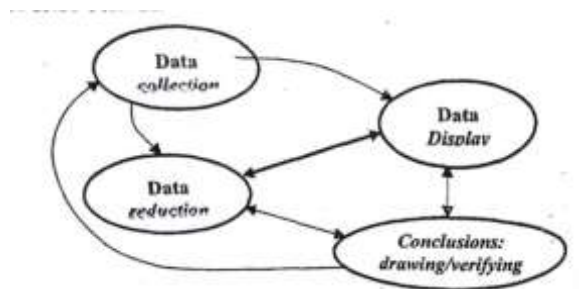
*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025*

Dokumen-dokumen yang tercantum pada Tabel 6 merupakan dokumen yang telah diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian selama proses pengumpulan data berlangsung. Dari sejumlah dokumen yang diidentifikasi pada tahap awal, peneliti melakukan pemilahan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, sehingga hanya dokumen yang benar-benar mendukung analisis yang dipertahankan, sedangkan dokumen yang tidak relevan tidak digunakan. Dengan demikian, seluruh dokumen yang tercantum dalam tabel tersebut merupakan dokumen terpilih yang digunakan secara keseluruhan sebagai sumber data pendukung dalam menganalisis strategi peningkatan kepemilikan IKD di Kabupaten Pesawaran, karena memuat informasi terkait dasar kebijakan, arah perencanaan organisasi, serta data kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pelaksanaan program IKD.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Dey (1993) dalam (Rofiah, 2022), analisis data kualitatif merupakan proses yang mencakup deskripsi, klasifikasi, dan penghubungan antara fenomena yang diamati dengan konsep yang dikembangkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model yang dikembangkan

oleh Miles *and* Huberman (1984). Berikut gambar dan penjelasan teknik analisis data Miles *and* Huberman (1984) yang digunakan dalam penelitian ini:



**Gambar 4. Komponen dalam analisis data (*Interactive model*)**

Sumber: Buku “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” Sugiono 2022

### 1. Data Collection

Data *collection* atau pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, dimulai dari akhir Oktober hingga awal Februari, dengan menelusuri berbagai dinamika yang terjadi pada objek penelitian sehingga diperoleh data yang beragam dan relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian menjadi dasar dalam proses analisis lebih lanjut untuk memahami strategi peningkatan kepemilikan IKD di Kabupaten Pesawaran.

### 2. Data Reduction

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan sebagai tahapan awal dalam proses analisis, di mana peneliti mengolah data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Pada tahap ini, data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, diseleksi, dan disusun secara sistematis untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kepemilikan IKD di Kabupaten Pesawaran. Proses reduksi data dilakukan melalui pentranskripsian hasil wawancara, pengolahan catatan observasi terhadap aktivitas pelayanan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Pesawaran, serta penelaahan dokumen pendukung, seperti Renstra Disdukcapil

Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2029. Melalui tahapan ini, data yang semula bersifat mentah disederhanakan dan diorganisasikan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan kecenderungan sebagai dasar penyusunan analisis pada tahap selanjutnya.

### 3. *Data Display*

Penyajian data atau data *display* dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan dan menyusun data agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, serta dilengkapi dengan tabel dan matriks untuk memperjelas struktur informasi. Penyusunan data dilakukan secara sistematis sehingga hubungan antar informasi menjadi lebih jelas dan terarah. Melalui penyajian data tersebut, peneliti dapat melakukan analisis secara lebih mendalam serta mengidentifikasi keterkaitan antar komponen yang diteliti dalam upaya peningkatan kepemilikan IKD di Kabupaten Pesawaran.

### 4. *Conclusions Drawing/Verifying*

Tahapan akhir dalam analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui proses penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data sebelumnya. Peneliti melakukan interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam data, kemudian menyusun kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Proses penarikan kesimpulan tidak dilakukan secara sekali jadi, melainkan melalui proses verifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan keabsahan data dan memperkuat temuan penelitian. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, meninjau kembali hasil observasi, serta mencocokkan dengan dokumen pendukung yang relevan. Melalui tahapan ini, kesimpulan yang dihasilkan telah mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 3.6 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan upaya untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterima secara kredibel dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi (Sugiyono, 2022). Dalam pendekatan kualitatif, keabsahan data menyesuaikan dengan paradigma dan tuntutan keilmuan yang digunakan. Untuk menjamin kesahihan data, diperlukan teknik keabsahan data berdasarkan sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, terdapat empat kriteria utama yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu:

#### 1. Kredibilitas Data

Kredibilitas berkaitan dengan sejauh mana data yang diperoleh dapat dipercaya. Untuk memastikan tingkat kepercayaan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan melalui proses pengecekan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan strategi peningkatan kepemilikan IKD di Kabupaten Pesawaran, yaitu Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dafduk), serta staf yang bertugas dalam pelayanan aktivasi IKD. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dari masing-masing sumber dan teknik tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta karakteristik spesifik dari setiap informasi yang diperoleh, sehingga dapat meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

#### 2. Pengujian *Transferability*

Transferabilitas mengacu pada sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasikan ke konteks atau situasi lain. Untuk mencapai transferabilitas, dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan uraian penelitian secara rinci dan sistematis terkait strategi optimalisasi peningkatan kepemilikan IKD masyarakat Pesawaran, sehingga pembaca

dapat menilai kemungkinan penerapan hasil penelitian di lingkungan lain yang serupa.

### 3. Pengujian *Dependability*

Dependabilitas merupakan ukuran keandalan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian dianggap andal apabila prosesnya dapat direplikasi oleh orang lain dan menghasilkan temuan yang serupa. Dalam hal ini, peneliti telah menyusun dokumentasi lengkap mengenai seluruh tahapan proses penelitian di lapangan yang disahkan oleh informan, serta menyampaikan catatan proses tersebut kepada pembimbing untuk memperoleh pengesahan atas validitas pelaksanaannya.

### 4. Pengujian *Confirmability*

Konfirmabilitas berfokus pada objektivitas data dan hasil penelitian, yaitu sejauh mana data dapat dikonfirmasi oleh pihak lain. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada tingkat objektivitas data dan hasil penelitian, yaitu sejauh mana temuan yang diperoleh dapat ditelusuri serta dikonfirmasi oleh pihak lain. Untuk menjamin konfirmabilitas, peneliti menerapkan pencatatan data secara transparan dan terverifikasi melalui berbagai bentuk bukti empiris, seperti transkrip hasil wawancara, dokumentasi foto hasil observasi, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan IKD di Disdukcapil Kabupaten Pesawaran.

Selain itu, hasil penelitian telah melalui proses bimbingan akademik bersama dosen pembimbing, sehingga setiap temuan dan interpretasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta meminimalkan adanya subjektivitas peneliti. Dengan demikian, objektivitas hasil penelitian tetap terjaga dan selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi peningkatan kepemilikan IKD di Disdukcapil Kabupaten Pesawaran, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Strategi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada dasarnya sudah baik karena mampu meningkatkan jumlah kepemilikan IKD dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun peningkatannya masih relatif kecil dan belum signifikan. Strategi yang diterapkan berfokus pada pendekatan integrasi layanan, yaitu melalui program jemput bola (PAK TUAH) serta pengintegrasian aktivasi IKD ke dalam layanan perekaman dan pencetakan KTP-el, yang menunjukkan upaya pemanfaatan layanan yang sudah berjalan untuk mendorong aktivasi IKD. Namun demikian, strategi tersebut belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum direncanakan secara sistematis, belum terintegrasi ke seluruh jenis layanan administrasi kependudukan, serta masih terbatasnya kegiatan sosialisasi akibat keterbatasan anggaran, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi yang lebih terencana, proaktif, dan terintegrasi agar peningkatan kepemilikan IKD di Kabupaten Pesawaran dapat dicapai secara lebih maksimal.
2. Strategi optimalisasi untuk meningkatkan kepemilikan IKD di Kabupaten Pesawaran didapat melalui analisis lingkungan internal dan eksternal menggunakan pendekatan SWOT. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa

Disdukcapil Kabupaten Pesawaran berada pada Kuadran III, yaitu kondisi organisasi yang menghadapi peluang eksternal yang cukup besar namun masih dibatasi oleh kelemahan internal. Oleh karena itu, strategi yang diprioritaskan adalah strategi W–O, yaitu strategi yang diarahkan untuk meminimalkan kelemahan internal agar peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Adapun strategi W-O diantaranya yaitu:

- 1) Integrasi aktivasi IKD ke dalam seluruh layanan administrasi kependudukan rutin.
- 2) Pemanfaatan literasi digital penduduk usia muda sebagai sasaran utama aktivasi IKD.
- 3) Pemanfaatan waktu tunggu pencetakan KTP-el sebagai momentum percepatan aktivasi IKD.
- 4) Pemanfaatan sistem digital dan data SIAK sebagai dasar dalam perencanaan strategis pelayanan administrasi kependudukan secara sistematis dan berbasis data.
- 5) Optimalisasi infrastruktur TIK kecamatan untuk menutup keterbatasan peralatan e-KTP daring.
- 6) Pemanfaatan media digital sederhana sebagai pengganti media informasi fisik dalam sosialisasi SOP aktivasi IKD.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan kepemilikan IKD di Disdukcapil Kabupaten Pesawaran, khususnya ditinjau dari perspektif manajemen strategis sektor publik, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

### **1. Saran Teoritis**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategis di sektor publik, khususnya dalam transformasi layanan digital, tidak cukup hanya ditopang oleh visi, misi, dan tujuan yang bersifat normatif. Oleh karena itu, disarankan bagi pengembangan kajian Ilmu Administrasi Negara agar lebih menekankan pada:

- 1) Pentingnya perumusan tujuan strategis yang spesifik dan adaptif terhadap digitalisasi, sehingga inovasi pelayanan publik seperti IKD tidak hanya diposisikan sebagai bagian administratif rutin, tetapi sebagai strategi perubahan perilaku masyarakat.
- 2) Pengembangan konsep manajemen strategis dalam pelayanan publik berbasis digital melalui penelitian lanjutan yang mengkaji aspek perilaku masyarakat dan adopsi teknologi, sehingga dapat memperkaya perspektif teoritis terkait faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi pemanfaatan layanan digital seperti IKD.

## **2. Saran Praktis**

### **a. Bagi Disdukcapil Kabupaten Pesawaran**

- 1) Penguatan Arah Strategis IKD

Visi, misi, dan tujuan strategis Disdukcapil Kabupaten Pesawaran diterjemahkan ke dalam sasaran operasional yang lebih spesifik terhadap IKD, seperti dengan menetapkan target peningkatan kepemilikan IKD secara terukur dan berbasis waktu. Hal ini penting agar IKD tidak hanya menjadi program pendukung, tetapi menjadi fokus strategis dalam transformasi layanan administrasi kependudukan.

- 2) Pelayanan berbasis jemput bola perlu dilakukan secara terjadwal dan berbasis wilayah prioritas.

Penentuan wilayah prioritas dapat difokuskan pada Kecamatan Gedong Tataan dan Negeri Katon, mengingat kedua wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk usia produktif yang paling besar serta tingkat masyarakat yang belum melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el yang relatif tinggi. Melalui pendekatan ini, pelayanan tidak hanya difokuskan pada perekaman dan pencetakan KTP-el, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara langsung.

- 3) Disdukcapil perlu memperkuat sosialisasi administrasi kependudukan khususnya IKD secara daring maupun luring.

Secara daring, sosialisasi dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan media sosial resmi yang telah dimiliki untuk menyebarkan informasi secara rutin,

sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sementara itu, secara luring, penguatan sosialisasi dapat dilakukan melalui kerja sama lintas stakeholder, seperti pemerintah desa, sekolah, dan berbagai perkumpulan masyarakat, guna memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD secara lebih merata.

- 4) Disdukcapil Kabupaten Pesawaran perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pelayanan secara konsisten dan berbasis data agar menjadi dasar perbaikan layanan.

Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, seperti jumlah aktivasi IKD, perekaman KTP-el, dan cakupan layanan per kecamatan, kemudian dilakukan pencatatan data secara rutin melalui sistem terintegrasi. Data tersebut selanjutnya dibahas dalam evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala, serta ditindaklanjuti melalui langkah konkret seperti penyesuaian strategi sosialisasi, penentuan wilayah prioritas, dan peningkatan kapasitas aparatur. Pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, khususnya aktivasi IKD. Optimalisasi infrastruktur TIK kecamatan untuk menutup keterbatasan peralatan e-KTP daring.

#### **b. Bagi Pemerintahan Daerah dan Pemangku Kepentingan Terkait**

Peningkatan kepemilikan IKD di Kabupaten Pesawaran membutuhkan intervensi aktif dari pemerintah daerah melalui penguatan kebijakan, kolaborasi, dan dukungan operasional. Secara teknis, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui kampanye edukasi berbasis media sosial dan pendekatan langsung oleh RT/RW, disertai sistem pengingat pelaporan data serta pemberian insentif non-materi seperti prioritas layanan. Selain itu, perlu dibangun kolaborasi lintas sektor dengan kecamatan, desa, sekolah, dan instansi lain untuk memperluas jangkauan sosialisasi serta memanfaatkan potensi generasi muda yang melek digital. Upaya tersebut juga harus didukung dengan pengalokasian anggaran khusus untuk program IKD yang difokuskan pada pengadaan sarana prasarana digital, pelayanan jemput bola, serta

peningkatan kapasitas SDM, sehingga implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal dan merata.

**c. Bagi Masyarakat**

Masyarakat Kabupaten Pesawaran disarankan untuk dapat aktif mengikuti berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil, seperti sosialisasi, maupun layanan keliling di tingkat desa atau kecamatan, dengan menyiapkan dokumen yang diperlukan sebelum datang serta mengajak anggota keluarga yang belum memiliki IKD untuk melakukan aktivasi. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan setiap perubahan data kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, maupun perubahan status perkawinan secara tepat waktu melalui pemerintah desa atau Disdukcapil, serta memanfaatkan layanan digital untuk memeriksa dan memperbarui data secara berkala guna menjaga keakuratan data kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajayi, V. O. (2017). Primary sources of data and secondary sources of data. *Benue State University, 1*(1), 1-6.
- Alamsyah, 2021. Model Komunikasi Jejaring Sosial dan Media Massa dalam Konteks PesanPublik. *Jurnal Dialektika Komunika* Vol. 9 No. 1 2021.
- Angkat, K. M. (2017). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 7*(1), 33-48.
- Anisa, C. &. (2020). Visi dan misi menurut Fred R. David dalam perspektif pendidikan islam. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4*(1), 70-87.
- Aprianto, K., Endroyono, E., & Nugroho, S. M. (2021). Analisis Manajemen Risiko SPBEMenggunakan COBIT 5 For Risk dan ISO 31000:2018 di Kabupaten Magetan ( E-government Risk Management Analysis Using COBIT 5 For Risk and ISO 31000:2018in Magetan Regency). *Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi, 23*(2).
- Boy, T., & Ariawan, A. (2023). Peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Hukum Telekomunikasi dalam SPBE di Indonesia. *UNES Law Review, 6*(2).
- BPS Kabupaten Pesawaran. (2025). Kabupaten Pesawaran Dalam Angka *Pesawaran Regency In Figures 2025*
- Budiono, P., & Mukhlis. (2024). Peran Krusial Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Publik. *Journal Publicuho, 7*(3), 1183-1189.
- Certo, S. C., & Peter, J. P. (1998). *Strategic Management: A Focus On Process*. Singapore: Monotype Composition Company.
- David, F. r. (2006). *Strategic Management concepts and cases tent edition*. Pearson Education.

- David, F. r., & David, F. R. (2019). *Manajemen Strategik suatu pendekatan keunggulan bersaing*. Jakarta : Salemba Empat.
- Disdukcapil PPK. (2025, 1 3). *Tahun Baru, Semangat Baru: Dukcapil Fokus Wujudkan Target Kinerja 2025*. Retrieved 7 17, 2025, from Disdukcapil Pangkalpinang Kota: <https://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/2025/01/03/tahun-baru-semangat-baru-dukcapil-fokus-wujudkan-target-kinerja-2025/>
- Dukcapil Kemendagri . (2024). *Identitas Kependudukan Digital Wujudkan Layanan Publik yang Inklusif*. Retrieved 2025, from Dukcapil Kemendagri
- Dukcapil Kemendagri. (2024, 5 28). *Dukcapil Terus Dukung Pengembangan IKD Menjadi INA-Pass*. Retrieved 7 1, 2025, from Dukcapil Kemendagri: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/dukcapil-terus-dukung-pengembangan-ikd-menjadi-ina-pass>
- Fatima, A. I. (2024). Strategi Pencapaian Target Aktivasi Kependudukan Digital. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 84-91.
- Gil-García, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A.(2020). Digital government and publicmanagement research: Finding thecrossroads. *Public Management Review*,22(3),297–315.<https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1604793>
- Hadi, I., & Widnyani, I. A. (2024). Modernisasi dan Digitalisasi Public Servis: Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Harmonisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 6(02), 639-658.
- Halim, A. F. (2025). Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Maros. *Pallangga Praja*, 7(1).
- Hidayati, A. D. (2026). Adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Transformasi Layanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5143-5156.
- Imada, A. K. (2025). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Surabaya. *Journal of Governance Innovation*.
- Iradatullah, A. S. (2025). *Peningkatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Melalui Sosialisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan*. (Doctoral dissertation, IPDN).

- Kusuma, K. D. (2025). *Efektivitas program Pak Tua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran* (Skripsi). Universitas Lampung. <https://digilib.unila.ac.id>
- KupasTuntas.co. (2019, 7 10). *Blanko e-KTP Terbatas, Disdukcapil Pesawaran Terbitkan Suket*. Retrieved 7 18, 2025, from KupasTuntas.co: <https://kupastuntas.co/2019/07/10/blanko-e-ktp-terbatas-disdukcapil-pesawaran-terbitkan-suket>
- Kurnianingsih, F. (2023). *Manajemen Strategis Sektor Publik*. Tanjungpinang: Labkomsos FISIP UMRAH.
- Lampungprov. (2024). *Pentingnya Data Kependudukan,Pj. Gubernur Lampung Ajak Aparatur SosialisasikanIKD dan KTP Elektronik*. Retrieved 2025, from Lampungprov.
- Mozin, S. Y., Maruf, R., & Kadir, F. (2025). Tipologi, Tahapan Inovasi Dalam Pelayanan Publik: Pendekatan Fokus dan Lokus Dalam Analisis Faktor Kunci Keberhasilan. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 2(2)
- Muammar, N., Mahmudah, R., & Afandi, A. (2024). Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Balai Desa Wonosari, Grujugan, Bondowoso. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 1(4), 107-121
- Muluk, M. R. K. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nikmatullah, Gitosaputro, & Syarief. (2022, 1 20). *Farmers' Digital Literacy in the Era of the Industrial Revolution 4.0*. Retrieved 1 27, 2026, from fp.unila.ac.id: <https://fp.unila.ac.id/literasi-digital-petani-di-era-revolusi-industri-4-0/>
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Permadi, I. B. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80-88.
- pttati. (2024, 12 3). *INA Digital Luncurkan INA Pass untuk Transformasi Layanan Publik Digital*. Retrieved 7 1, 2025, from PT Tatacipta Teknologi Indonesia: <https://pttati.co.id/news/ina-digital-luncurkan-ina-pass-untuk-transformasi-layanan-publik-digital>
- Rakornas Dukcapil. (2025, 4 25). *Integrasi Data Kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dukung Kebijakan Ekonomi Digital dan*

- Inklusi Keuangan*. Retrieved 5 6, 2025, from ekon.co.id: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6329/integrasi-data-kependudukan-dan-identitas-kependudukan-digital-ikd-dukung-kebijakan-ekonomi-digital-dan-inklusi-keuangan>
- Riyanto, S. A. (2021). *Analisis SWOT sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani (CV. Bintang Surya Madani).
- Rofiah, C. (2022). Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi? *Develop*, 6(1), 33-46.
- Sandayu, V. B. (2025). *Studi pelayanan identitas kependudukan digital (IKD) di Kota Bandar Lampung dan Kota Malang* (Skripsi). Universitas Lampung. <https://digilib.unila.ac.id>
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 10.
- Subarsono, D. (2021). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Supriyanto, D., Nuryanti, N., & Noegroho, A. (2024). Media sosial dalam efektivitas komunikasi pelayanan publik instansi pemerintah daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7796-7810.
- Suwarno, I. &. (2025). Optimalisasi Digitalisasi KTP Dengan Sistem Pelayanan di Kecamatan Pakal. . *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(1), 114-122.
- Syafitri, I., Nurman, N., Mardatillah, A., & Hefriyenni, R. (2025). Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD): Studi Kesiapan SDM dalam Era Transformasi Digital di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 277-301.
- Thaha, N. (2025). Keberhasilan implementasi kebijakan berbasis inovasi dan kualitas SDM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 1-5.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Vigfússon, K., Jóhannsdóttir, L., & Ólafsson, S. (2021). Obstacles to strategy implementation and success factors: A review of empirical literature.

*Strategic Management-International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 26(2).*

Wheelen , T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy*. Pearson.

Wiguna. (2024, 8 4). *Dari 9 Juta Penduduk, Aktivasi IKD se-Lampung Baru 5,22 Persen*. Retrieved 5 9, 2025, from IDN Times Lampung: <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/dari-9-juta-penduduk-aktivasi-ikd-se-lampung-baru-5-22-persen?page=all>

Yulanda, A. &. (2023). Transformasi Digital: Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(3)*, 103-110.